

No. 212 Oktober 2023

BaKTI News

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

**MENINGKATKAN PENGHIDUPAN
MELALUI PENGUATAN
SISTEM PERENCANAAN DESA**

PERDES DESA INKLUSIF

**SINKRONISASI RPJPD TERHADAP
RANCANGAN AKHIR RPJPN
2025-2045**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI**News**

Oktober 2023

No. **212**

- 1** Meningkatkan Penghidupan Melalui Penguatan Sistem Perencanaan Desa
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 7** Perdes Desa Inklusif
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 12** Perempuan Papua Saling Dukung Kesehatan Menstruasi
Bagian I
Oleh **NARRISWARI**
- Bengkel Komunikasi
15 Penulisan Kreatif dan Pengelolaan Website
Oleh **ITA IBNU**
- 19** Mama Bo'i Menjaga Ibu dan Bayi di Rote Ndao
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 23** Sinkronisasi RPJPD terhadap Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045
Oleh **ITA IBNU**

- 30** Jalan Menuju Keamanan Ekonomi Di Indonesia
Oleh **SATU KAHKONEN, UTZ PAPE & RABIA ALI**
- 33** Atasi *Stunting*, Optimalkan Layanan Air Limbah Domestik
Oleh **TIM PROGRAM WASH, YAYASAN BaKTI-UNICEF**
- 37** Voices for Just Climate Action di Festival Forum KTI 2023
Oleh **RIDWAN ARIF**
- 40** Diskusi Inspirasi BaKTI Virtual dan Podcast Basuara
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Foto cover: **Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI**



Anita Apriyanti Dapa Mede (kanan depan), Fasilitator Desa pada Program BangKIT sedang melakukan baseline survey di salah satu desa di Sumba Barat Daya. Di Kabupaten Sumba Barat Daya ada 40 desa menjadi target implementasi program ini, dipilih oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh program ini. Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

MENINGKATKAN PENGHIDUPAN MELALUI PENGUATAN SISTEM PERENCANAAN DESA

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Puluhan kursi berwarna biru dan merah tersusun rapi menunggu peserta datang. Satu persatu peserta dari perwakilan desa, kecamatan serta kabupaten memenuhi aula Hotel Angrek Inn-Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Waktu menunjukkan pukul 09:00 WITA sebanyak 68 orang peserta yang terdiri dari 10 perempuan dan 58 laki-laki memenuhi ruang pertemuan.

Hari Rabu, 9 Agustus 2023 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Pengembangan Penghidupan Masyarakat yang Inklusif di

Perdesaan Kawasan Timur Indonesia atau yang disingkat Program BangKIT. Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kabupaten Seram Bagian Timur di Provinsi Maluku menjadi lokasi intervensi program BangKIT yang didanai oleh Pemerintah Jepang dan diadministrasi oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Yayasan BaKTI.

Sumba Barat Daya atau yang disingkat SBD merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat, dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2007. Kabupaten SBD memiliki luas wilayah daratan sebesar



Sambutan Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa. Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

1.445,32 kilometer persegi meliputi sebelas wilayah Kecamatan yang terdiri dari 129 desa dan dua kelurahan. Pada tahun 2022, jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak 320.554 jiwa. Pusat pemerintahan berada di Kota Tambolaka.

Sejumlah 40 desa telah ditetapkan sebagai lokasi implementasi Program BangKIT di SBD. Ke 40 desa tersebut dipilih sendiri oleh pemerintah Kabupaten SBD dengan kategori yang disusun oleh program BangKIT. Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk mengomunikasikan tujuan yang ingin dicapai, durasi, rencana pelaksanaan, pihak mana saja yang dilibatkan serta kegiatan yang akan dilaksanakan Program BangKIT kepada lebih banyak pihak di SBD.

Agenda pertama kegiatan sosialisasi Program BangKIT diawali dengan pembacaan doa. Dengan khidmat para peserta menundukkan wajah sejenak mengucap doa agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana. Selanjutnya doa bersama diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelahnya, agenda dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI Muhammad Yusran Laitupa. Bapak Yusran mengawali sambutannya dengan mengucap

terima kasih kepada Sekretaris Daerah Kabupaten SBD, Kepala Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) Kabupaten SBD dan terutama kepada seluruh undangan yang hadir. Selain memperkenalkan BaKTI dan fokus kerjanya, secara umum dijelaskan tentang Program BangKIT. Disampaikan bahwa Program BangKIT memiliki 2 komponen utama. Komponen pertama adalah pemberdayaan yang meliputi pengembangan penghidupan yang diawali dengan perencanaan, peningkatan kapasitas aparatur di level desa dan penguatan *support system* dari pemerintah daerah ke program di level desa. Sedangkan komponen kedua adalah terkait riset. Selama program ini berjalan selama itu pula dilakukan riset, yang hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat-melalui Bank Dunia sebagai rekomendasi untuk inisiasi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan mata pencaharian.

Hadir memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi, Sekertaris Daerah Kabupaten SBD, Bapak Fransiskus M. Adi Lalo, S.Sos. Sebelum memulai sambutan tidak lupa menyapa seluruh peserta

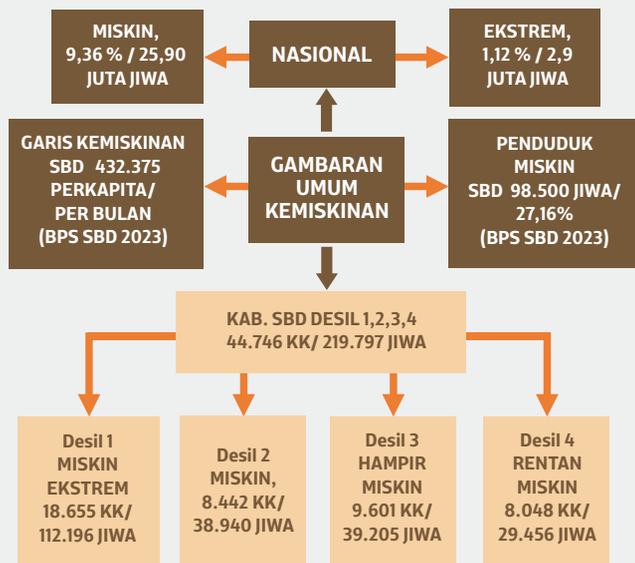
yang menyempatkan waktu hadir pada kegiatan sosialisasi ini terutama kepada 40 pemerintah desa target Program BangKIT.

Beberapa poin penting yang dipaparkan Bapak Fransiskus pada kesempatan ini di antaranya terkait aspek penyebab kemiskinan ekstrim di SBD. Menurutnya, kemiskinan ekstrim yang terjadi di SBD di antaranya disebabkan oleh keterbatasan ruang fiskal di mana dana yang ada belum cukup untuk membiayai kebutuhan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan sarana prasarana. Keterbatasan infrastruktur di SBD menurutnya membatasi peluang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan vital seperti sarana air bersih, sarana penerangan pun terbatas. Keterbatasan sarana pendidikan menyebabkan literasi dan numerasi di SBD sangat rendah. Selain keterbatasan SDM, isu kesetaraan gender, ketahanan pangan dan gizi buruk, konflik sosial dan ketidakstabilan politik juga merupakan penyebab kemiskinan di SBD. Belum lagi terkait keterbatasan kemampuan SDM pemerintah daerah yang tidak kompetitif, penempatan ASN yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten SBD menghimbau semua pihak untuk bersinergi optimal dalam mendukung program BangKIT agar dapat berjalan baik dan berdampak positif untuk kepentingan masyarakat *Loda Wee Maringngi Pada Wee Malala* (Tanah yang dingin dan terberkati). “Yayasan BaKTI datang bukan membawa ikan tapi membawa kail, bukan bawa uang tapi untuk memberdayakan masyarakat desa agar bisa kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan aset yang potensial agar dapat berdampak secara ekonomi” ucapnya mengakhiri sambutan.

Sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh sekretaris daerah menjadi penanda berakhirnya rangkaian pembukaan kegiatan. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang berturut-turut dibawakan oleh drh. Oktavianus Dapadesa, M.Si selaku Kepala Bapperida Kabupaten SBD, Semon Lende selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Gambaran Umum Tingkat Kemiskinan di Kabupaten SBD



Sumber: Materi Presentasi Kepala Bapperida Kabupaten SBD

Desa Kabupaten SBD dan terakhir presentasi oleh Ricky Djodjoko sebagai *Project Coordinator* Program BangKIT.

Materi pertama dibawakan drh. Oktavianus Dapadesa, M.Si berjudul Prioritas Program Kerja Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menurut drh. Oktavianus, perbedaan antara kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yakni kemiskinan lebih menggambarkan ketidak mampuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup dan mengembangkan hidup secara bermartabat, dalam hal ini lebih pada kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan rumah. Sedangkan kemiskinan Ekstrim selain tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, juga tidak bisa mengakses kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Menanggapi perbedaan data kemiskinan antara BPS (Badan Pusat Statistik) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten SBD, menurutnya hal ini disebabkan karena P3KE mengambil data kemiskinan dalam 4 kategori yaitu Desil 1-4, Miskin Ekstrem, Miskin, Rentan Miskin dan Hampir Miskin, sedangkan BPS hanya 1 kategori saja,



1 Sekda Kabupaten SBD, Fransiskus M. Adilalo, S.Sos 2 drh. Oktavianus Dapadesa, M.Si. 3 Para peserta aktif bertanya mengenai pelaksanaan program ini. Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

yakni Miskin. Data kemiskinan ekstrem ini diinput melalui pendataan keluarga oleh BKKBN sedangkan data kemiskinan adalah produk BPS.

Selain mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan dari pusat, Oktavianus menjelaskan bahwa pihak pemerintah kabupaten juga telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut di antaranya ditunjukkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten SBD dalam mendukung pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diimplementasikan melalui beberapa program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri dan ketenagakerjaan. Kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menasar masyarakat miskin. Namun pertanyaannya adalah mengapa kemiskinan ekstrim di SBD masih sangat tinggi? Menurutnya, hal ini disebabkan oleh 3 faktor yakni *exclusion error* yang tinggi, database masih bersifat sektoral dan *political will*-dalam hal ini terkait eksekusi kebijakan yang belum optimal.

Mengakhiri materinya, Kepala Bapperida menyampaikan harapannya agar pemerintah

desa dan kecamatan dapat betul-betul merespons secara positif Program BangKIT yang akan turun ke desa-desa dan saling bersinergi serta berkolaborasi dengan Yayasan BaKTI dalam implementasi program ini.

Pemaparan kedua tidak kalah informatifnya. Sebelum memulai pemaparannya yang berjudul Prioritas Penggunaan Dana Desa (Permendes PDPTT No. 08 tahun 2022) dan Gambaran Umum Proses Perencanaan Pembangunan Desa, Bapak Semon Lende selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten SBD meng-apresiasi seluruh peserta yang tetap serius menyimak materi meski hari sudah semakin siang.

Menurutnya, desa menjadi sebuah lokus terkecil yang menjadi perhatian karena desa ibaratnya kaum marginal, kaum yang terlupakan, kaum yang selalu tidak diingat tetapi saat tertentu desa selalu ditempatkan pada tempat yang paling depan.

Bila diakumulasi, Dana Desa yang telah dialokasikan kepada pemerintah desa sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 sudah mencapai 1,6T. Namun demikian, Dana Desa ini masih belum

memberi dampak positif bagi pembangunan manusia di tingkat desa, hal ini terlihat dari jumlah masyarakat miskin ekstrim dan jumlah stunting yang masih tinggi, ungkapnya. “Jika ingin perencanaan yang baik, hal pertama yang wajib dibuat oleh pemerintah desa yang baru adalah merevisi RPJMDes sesuai dengan visi misi politik saat mencalonkan diri, dengan berpayung pada RPJMD Kabupaten serta tetap mengacu pada 7 program strategis Kabupaten Sumba Barat Daya” saran Semon.

Berkaitan dengan proses perencanaan 40 desa yang menjadi target BangKIT, menurutnya masih ada proses perencanaan yang tidak berjalan dengan tepat. Bicara tentang perencanaan, yang harus melakukan perencanaan di tingkat dusun adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fasilitasi dari pemerintah desa selanjutnya dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Namun kenyataan di lapangan kolaborasi kedua lembaga tersebut belum berjalan dengan baik. Pemerintah desa selalu mengambil alih proses perencanaan. Masih ditemukan BPD yang tidak mengetahui fungsi dan tugasnya, padahal pada prinsipnya BPD punya peran penting sebagai lembaga yang menyelenggarakan perencanaan, menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi evaluasi di tingkat desa. Terlebih, dari 40 desa target masih ada RPJMDes yang penyusunannya hanya *copy paste* dari desa lain.

Di akhir presentasinya beliau juga mengajak para kepala desa yang masa jabatannya akan segera berakhir pada Desember 2023 untuk memberikan dukungan kepada siapapun pejabat yang akan menggantikan, agar Program BangKIT di desa masing-masing dapat terlaksana dengan baik.

Tibalah peserta pada materi inti terkait sosialisasi Program BangKIT yang diampu oleh Bapak Ricky Djodjobo selaku *Project Coordinator*. Di sesi ini, dijelaskan bahwa Program BangKIT adalah program pengembangan penghidupan masyarakat di perdesaan yang bertujuan membantu masyarakat belajar mengembangkan penghidupan yang ada di desa atau di sekitar masyarakat desa sendiri secara inklusif dan partisipatif. Program diimplementasikan melalui

upaya meningkatkan kualitas dari apa yang sudah dikerjakan selama ini dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Menurutnya, perlu diketahui bahwa perencanaan desa bisa keliru jika dianggap sebagai cara atau alat tukar untuk mendapatkan/mengakses Dana Desa. Ketika hal tersebut terjadi maka akan sulit untuk melihat mana keinginan dan mana kebutuhan karena tidak adanya identifikasi permasalahan (akibat perencanaan desa yang *copy paste* dari desa lain).

Dijelaskan Pak Ricky, dalam banyak praktik di tingkat desa, ketika anggaran telah digunakan dan direalisasikan maka itu sudah dianggap berhasil. Yang diukur hanya apakah anggaran yang terserap sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Namun, hal ini dapat dihindari jika dilakukan evaluasi berkala agar dalam proses perencanaan tidak mengulang hal yang sama yang tidak menyelesaikan persoalan yang ada. Program BangKIT hadir di SBD untuk membantu pemerintah dan masyarakat desa dalam meningkatkan upaya-upaya penghidupan melalui mekanisme perencanaan yang berbasis masyarakat yang partisipatif dan terintegrasi dengan sistem perencanaan desa.

Tidak lengkap jika pemaparan tidak memberi ruang kepada peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan saran serta pertanyaan. Sebagai sesi akhir dari kegiatan sosialisasi ini, Adela Gultom-*District Coordinator* Program BangKIT SBD-yang bertindak sebagai moderator memandu sesi diskusi sore itu. Peserta yang antusias mengangkat tangan, ada yang dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan juga dari media. Secara umum, pertanyaan dari pemerintah kecamatan dan desa terkait proses perencanaan desa yang selama ini menurut mereka belum cukup baik dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan pelibatan BPD dan aparat desa yang belum maksimal. Banyaknya regulasi atau aturan terkait pengelolaan dana desa, proses *monitoring* dan evaluasi yang belum optimal, dan usulan-usulan yang belum terealisasi.

Bergantian, Kepala Bapperida dan *Program Coordinator* BangKIT merespons pertanyaan-

pertanyaan tersebut. Menurut Bapak drh. Oktavianus Dapadesa, proses perencanaan terkadang belum terintegrasi secara utuh dalam satu sistem perencanaan nasional. Secara reguler proses ini sudah diikuti oleh Bapperida sebagai perencana dan pengendali program daerah, hanya saja dalam regulasi peran Bapperida tidak ada. Dalam kasus tersebut, lebih kepada kewenangan BPMPD, sementara yang berperan dalam pengendalian adalah camat dan BPMPD. Poin penting dalam proses penyusunan RPJMDesa adalah arah kebijakan dan program prioritas desa dapat bermuara pada kegiatan prioritas sehingga Musrenbang cukup dilakukan 5 tahun sekali. Desa selain sebagai pemerintah yang menyusun perencanaan makro, juga menyusun perencanaan teknis. Ke depannya pemerintah kabupaten juga harus diinformasikan mengenai hasil Musrenbangdes.

Persoalan lainnya adalah karena program perencanaan di desa tidak terintegrasi pada sistem perencanaan reguler pemerintah daerah. Desa perlu berkoordinasi dengan Bapperida sebelum melakukan Musrenbang. Saat berkoordinasi, Pemdes bisa meminta dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah karena dokumen ini merupakan bingkai kerja dari perangkat daerah. Terkait usulan yang belum disetujui hal ini juga terkait pembatasan fiskal, karena daerah tidak bisa melakukan sebuah kegiatan yang tidak mampu dibiayai.

Menambahkan penjelasan kepala Bapperida, menurut Pak Ricky salah satu bagian dari Program BangKIT adalah penguatan tim perencana desa dan BPD dengan harapan mereka juga paham tentang perencanaan desa, bukan sebagai pelengkap saja.

Terkait pertanyaan dari media mengenai mengapa desa intervensi hanya 40 dari 129 desa, dijelaskan bahwa Program BangKIT memiliki keterbatasan dari sisi tenaga, waktu dan juga dana. Oleh sebab itu Yayasan BaKTI telah melatih mitra terkait yang ada di dalam anggota forum BangKIT Kabupaten agar ada penyebaran pengetahuan sehingga kabupaten memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menyebarluaskan ke desa lainnya.

Selain mengapresiasi kehadiran BangKIT di SBD, pemerintah desa dan kecamatan meletakkan harapan besar pada program ini. Harapannya ada perubahan dalam proses perencanaan desa dimana suara masyarakat miskin dan rentan bisa didengar dan diakomodasi sehingga dapat meningkatkan penghidupan masyarakat desa.

Sebelum mengakhiri kegiatan sosialisasi sore itu, beberapa poin rekomendasi dihasilkan di antaranya adalah perlu ada pembenahan data di desa, karena data menjadi titik pijak perencanaan. Perencanaan harus menyoar masyarakat miskin, marginal, perlu menyusun perencanaan yang lebih terpadu dan kolaboratif (tidak bersifat sektoral), perlu meningkatkan kerja sama antara swasta, NGO dan pemerintah. Menghimbau pemerintah desa untuk menjadikan data P3KE sebagai basis data dalam penyaluran bantuan di desa.

Rekomendasi terkait desa di antaranya adalah kepala desa yang habis masa jabatannya harus menyampaikan kepada pejabat selanjutnya untuk mendukung Program BangKIT yang ada di desa. Desa-desa dampingan Program BangKIT harus membuka diri untuk bekerja sama dengan Yayasan BaKTI, tenaga ahli, pendamping desa, pendamping lokal desa untuk bersama-sama membangun desa dalam memperbaiki proses perencanaan sehingga dapat menjadi *pilot project* program.

Sosialisasi hanya langkah awal kegiatan, selanjutnya serangkaian kegiatan akan dilaksanakan oleh tim BangKIT SBD. Agenda terdekat adalah sosialisasi program BangKIT tingkat desa yang dilakukan di 40 desa dampingan.

Kegiatan yang di mulai pukul 09:00 pagi dan berakhir sore pukul 15:00 diakhiri dengan sesi foto bersama oleh seluruh peserta. Dengan mengacungkan tangan yang terkepal, seluruh peserta sepakat untuk bekerja bersama-sama demi peningkatan penghidupan perdesaan dalam bingkai program BangKIT.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program BangKIT dapat menghubungi: info@bakti.or.id

PERDES DESA INKLUSIF

Oleh
M. GHUFRAN H. KORDI K.

Peraturan Desa (perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa, setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Perdes merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum, perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Sebagai kerangka hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah desa membuat perdes untuk melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai pemerintah dan penyelenggara negara di tingkat desa. Di antara kewajiban pemerintah desa adalah pemenuhan hak dan perlindungan kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai marginal dan rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, kelompok minoritas, warga miskin, dan sebagainya.

Penyandang Disabilitas atau biasa juga disebut Difabel (*differently abled people*) adalah kelompok masyarakat rentan dan marginal, yang selama ini diabaikan di desa. Tidak hanya diabaikan, Penyandang disabilitas juga



mendapatkan diskriminasi dan kekerasan karena stigma dan stereotip di masyarakat.

Berdasarkan pendekatan hak asasi manusia (HAM) dan transformasi sosial, maka disabilitas adalah interaksi antara keterbatasan dan hambatan. Keterbatasan adalah adanya masalah pada fungsi tubuh atau perubahan pada struktur tubuh. Karena itu, mengurangi dan menyingkirkan hambatan akan memaksimalkan kemandirian, harga diri, pilihan dan kontrol dalam hidup Penyandang Disabilitas.

Butuh Peraturan Desa

Pemerintah desa melalui perdes dapat mengembangkan pembangunan inklusif, yakni pembangunan yang terbuka, melibatkan, dan merangkul semua kelompok sosial yang selama ini disebut sebagai kelompok marginal dan rentan.

Pemerintah Kabupaten Maros bekerja sama dengan Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) Yayasan BaKTI mengembangkan 12 Desa Inklusif di tahun 2022. Sebagai desa contoh, yaitu Desa Mina Baji,



Mangeloreng, Baruga (Kecamatan Bantimuring), Borikamase, Borimasunggu, Mattirotasi (Kecamatan Maros Baru), Desa Simbang, Desa Samangki, Desa Tanete (Kecamatan Simbang), Desa Lekopancing, Desa Damai, dan Desa Toddopulia (Kecamatan Tanralili). Pengembangan Desa Inklusif mengacu pada sembilan indikator yang telah dikembangkan oleh pemikir dan aktivis pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas (lihat box).

Pembentukan peraturan atau regulasi yang inklusif adalah upaya untuk menuju Desa Inklusif, dan merupakan salah satu indikator Desa Inklusif. Dengan adanya Perdes Desa Inklusif maka pemerintah desa mempunyai kerangka hukum dan kebijakan untuk membangun Desa Inklusif. Melalui Perdes Desa Inklusif, pemerintah mulai mengubah pandangan terhadap kelompok-kelompok marginal dan rentan, yang sebelumnya dipandang rendah dan dianggap sebagai beban masyarakat. Perdes juga membuka ruang dan melibatkan kelompok marginal dan rentan dalam pembangunan.

Sembilan Indikator Desa Inklusif

- 1 Membangun perspektif disabilitas dan inklusi sosial;
- 2 Data disabilitas dan kelompok marginal/minoritas lainnya yang selalu tervalidasi;
- 3
- 4 Pengorganisasian disabilitas dan kelompok marginal;
- 5 Melibatkan disabilitas dan kelompok marginal/minoritas dalam pembentukan dan pengambilan kebijakan;
- 6 Perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif disabilitas dan kelompok marginal/minoritas;
- 7 Pembentuk-an peraturan/regulasi desa yang inklusif;
- 8 Membangun aksesibilitas infrastruktur; dan
- 9 Membangun sistem informasi; dan mengembangkan proses pembelajaran bersama untuk membangun desa inklusif (Salim et al., 2020).



Foto: Dok. Yayasan BaKTI

Penyusunan Peraturan Desa

Tahun 2023 pemerintah desa pada 12 desa yang dijadikan contoh Desa Inklusif di Kabupaten Maros membuat Perdes Desa Inklusif. Penyusunan perdes mengikuti tata aturan pembentukan perdes, yang dimulai dengan pengumpulan data untuk mengetahui jumlah dan kondisi penyandang disabilitas dan kelompok marginal dan rentan lainnya di desa. Pendataan dilakukan oleh Kelompok Konstituen (KK), organisasi di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk untuk mendampingi kasus-kasus di desa, sekaligus melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak kelompok marginal dan rentan.

Hasil dari pendataan tersebut digunakan untuk penyusunan pokok-pokok pikiran atau semacam 'naskah akademik' Perdes Desa Inklusif. Pokok-pokok pikiran ini disosialisasikan kepada pemerintah dan masyarakat desa untuk memberi respons dan masukan, untuk memperkaya pokok-pokok pikiran tersebut, yang nantinya juga memperkaya isi Raperdes (Rancangan peraturan desa).

Tahap selanjutnya adalah penyusunan draf Raperdes Desa Inklusif yang dilakukan oleh tim penyusun yang berasal dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan pemerintah desa. Draft Raperdes Desa Inklusif yang telah dikonsultasikan dengan masyarakat dari berbagai

unsur, kemudian diserahkan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk dibahas bersama kepala desa.

Perdes Desa Inklusif

Sampai bulan Juli 2023, telah dilakukan konsultasi publik Raperdes Desa Inklusif pada 12 desa, dan sejak Juni-Agustus 2023 BPD mulai melakukan pembahasan Raperdes. Pemerintah Desa Damai telah mengesahkan Perdes Desa Inklusif pada 14 Juni 2023, kemudian disusul Pemerintah Desa Samangki pada 15 Juni 2023. Kedua Perdes tersebut adalah Peraturan Desa Damai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Inklusif (Lembaran Desa Damai Tahun 2023 Nomor 1), dan Peraturan Desa Samangki Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Inklusif (Lembaran Desa Samangki Tahun 2023 Nomor 1).

Perdes tersebut mengatur beberapa hal yang sangat prinsip di tingkat desa terkait dengan kelompok marginal dan rentan. Tujuan Perdes Desa Inklusif adalah: **A** memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat marginal dan masyarakat rentan; **B** memberdayakan kelompok masyarakat marginal dan masyarakat rentan; **C** mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi Masyarakat marginal dan masyarakat rentan; dan **D** meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal dan masyarakat rentan.



Foto: Dok. Yayasan BaKTI

Frasa “penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak” pada tujuan perdes adalah frasa umum yang ditemukan pada instrumen-instrumen HAM di tingkat nasional. Dengan menurunkannya ke dalam perdes sebagai dokumen kebijakan di tingkat desa, secara langsung memasyarakatkan frasa dan pendekatan-pendekatan HAM hingga ke tingkat desa. Selama ini, isu dan istilah HAM hanya didengar oleh masyarakat desa melalui berbagai media, yang sebagian di antaranya menjadi isu dan istilah negatif, yang dituduh sebagai kebarat-baratan, tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, dan seterusnya.

Sedangkan sasaran Perdes Desa Inklusif adalah: **A** penganut agama minoritas dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; **B** penyandang disabilitas; **C** anak; **D** perempuan; **E** lanjut usia; **F** masyarakat miskin; dan **G** kelompok masyarakat marginal dan rentan lainnya.

Dari sasaran yang disebutkan, penganut agama minoritas dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Penyandang Disabilitas adalah kelompok yang perlu digaris-bawahi. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kelompok yang sering dituduh kafir atau musyrik. Karena itu, ketika pemerintah desa menerima dan memasukkan ke dalam dokumen kebijakan dalam bentuk perdes,

adalah suatu kemajuan karena juga pengakuan dan perlindungan kepada mereka. Sementara Penyandang Disabilitas adalah kelompok yang sering mengalami diskriminasi dan kekerasan, karena dianggap sebagai pembawa sial dan beban sosial.

Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh KK, yang digunakan untuk penyusunan perdes ini, baru diketahui bahwa, sebagian besar Penyandang Disabilitas tidak menempuh pendidikan. Karena itu, ketika Program INKLUSI-BaKTI mencoba menghubungkan Penyandang Disabilitas dengan dunia usaha (Alfa Mart dan Hotel Novotel), pun mereka kesulitan mengakses pekerjaan, karena pendidikan mereka yang sangat rendah.

Perdes Desa Inklusif mengatur hal-hal yang paling mendasar kelompok marginal dan rentan yang merupakan HAM. Pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas di dalam perdes, akan memberikan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah desa untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka. Pasalnya, selama ini di tingkat desa, Penyandang Disabilitas adalah kelompok yang jumlahnya cukup signifikan, namun perhatian dan pelibatan mereka dalam pembangunan di desa sangat minimal.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-Yayasan BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



Berlatih menghitung siklus menstruasi merupakan salah satu sesi wajib dalam workshop Menstruasi Sehat yang difasilitasi oleh Biyung. Menghitung siklus menstruasi membantu individu untuk mengetahui kapan menstruasi berikutnya dan memetakan fase-fase tubuh sehingga dapat menentukan bentuk dukungan terhadap diri sendiri. Foto: **Project M/Narriswari**

PEREMPUAN PAPUA SALING DUKUNG KESEHATAN MENSTRUASI

Oleh
NARRISWARI

Menstruasi adalah proses alamiah dalam tubuh seseorang yang memiliki rahim. Proses menstruasi melambangkan kesuburan seseorang yang seharusnya menjadi momen berharga dan dirayakan. Namun, membicarakan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk menstruasi, masih banyak diacuhkan atau dianggap tabu.

Pengalaman Menstruasi Pertama

Suara lari kaki Melani memecah kesunyian di rumah sederhana milik keluarga Sorabut di jantung Kota Wamena. Siang itu, hanya sang mama yang berada seorang diri di rumah, menunggu kepulangan anak-anaknya dari sekolah.

Tergesa Melani memasuki rumah, mengacuh-kan mama lantas memburu kamar mandi. Seketika ia terkesiap menatap nanar pada celana dalamnya.

“Saya akan meninggal ini,” kata Melani dalam hati.



(Atas) Rode Wanimbo (tengah), salah satu kolaborator dalam gerakan Perempuan Bantu Perempuan Pakai Pembalut Kain di Papua, memanfaatkan jabatan strategisnya sebagai ketua Departemen Perempuan GIDI dengan membantu sesama perempuan dan anak perempuan mendapatkan akses edukasi terkait tubuh, kesehatan reproduksi dan menstruasi.

Foto: **Project M/Narriswari**

(Bawah) Partisipan workshop Menstruasi Sehat melakukan latihan pertahanan diri sederhana yang membiasakan tubuh agar tetap waspada. Salah satu gerakannya adalah cara melepaskan genggaman tangan. Foto: **Project M/Kristina Soge**

Ia membuka pintu kamar mandi, memanggil lirin mamanya dan menceritakan kekhawatirannya dengan haru. Sang mama justru bereaksi sebaliknya. Girang.

Mama menghilang sebentar ke kamarnya, mengambil sesuatu yang dibungkus plastik putih tipis.

“Mama tutup pintu kamar mandi rapat-rapat lalu ajar saya bagaimana caranya pasang di celana dalam. Mama juga bilang harus cuci bersih habis pakai pembalut baru dibuang,” imbu Melani.

Membicarakan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk menstruasi, cenderung dianggap acuh atau tabu. Alhasil individu yang bermenstruasi kalut menemukan sekresi darah menstruasi pertama kali.

Rode Wanimbo di Jayapura, misalnya. Ia mengalami menstruasi pertamanya saat duduk di bangku Kelas 6 SD.

“Ini kenapa? Saya tidak ada luka kok jadi berdarah. Panik. Waktu itu saya SD kelas 6,” kata Rode.

Sang mama luput mengajaknya berdiskusi terkait ihwal proses pubertas yang dilalui perempuan. Buatnya bukan menjadi soal, sebab mamanya belajar hal yang sama dari neneknya –

bahwa perempuan belum punya kesempatan untuk belajar tentang ketubuhan, dibandingkan saat ini.

“Mama saya generasi pertama mengenal pendidikan, sampai SMP lalu menikah. Mereka juga sedikit sekali mendapatkan pengetahuan dan informasi. Sekarang pun perempuan muda masih terbatas informasi yang didapatkan, termasuk menghitung siklus menstruasi. Saya baru tahu kemarin ketika ikut workshop,” kata Rode melanjutkan

Vei, bukan nama sebenarnya, perempuan pelajar lain di Wamena terpaksa absen dari sekolah selama tiga hari, saking takutnya mengamati cairan berwarna merah mengalir di pangkal pahanya.

“Saya waktu itu duduk di kelas 3 SMP. Betul-betul bingung dan takut. Kenapa bisa begini? Bagaimana jika darah keluar terus? Akhirnya saya pilih tinggal di rumah,” kata Vei.

Berdiam di rumah juga dilakukan pada Mauri Wandikbo, seorang mama yang usianya 16 tahun di atas Vei. Penggemar musik reggae ini mengakui pengalaman menstruasinya terasa amat menyakitkan di bagian perut bawahnya.

Mauri merupakan salah satu pengambil inisiatif yang mengorganisir perempuan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) berpartisipasi dalam *workshop* kesehatan menstruasi dan menjahit pembalut kain di Wamena.

“Tiga hari saya hanya tidur di kamar. Saya tidak cerita tapi mama dan saudara-saudara perempuan datang, bawa makanan. Mungkin mereka sudah tahu tapi memang tidak tanya,” kata Mauri.

MITOS

FAKTANYA:

menstruasi bukan tanda kesiapan seseorang untuk menikah. Usia untuk menikah dan melahirkan SEBAIKNYA di atas usia 20, saat tubuh, hormon, dan otak sudah benar-benar siap untuk bisa menanggung kehamilan dan proses melahirkan dengan sedikit resiko.

Setiap individu berhak memutuskan apakah ia ingin menikah atau tidak, dan kapan ingin menikah.

Westiani, fasilitator dari Biyung, mengajak partisipan mengkritisi sebuah pernyataan "anak yang sudah menstruasi boleh menikah." Reaksi dari partisipan beragam. Sebagian menyetujuinya dan lainnya tidak. Foto: **Project M/Kristina Soge**

Sikap Kolektif Terhadap Menstruasi

Sikap diam mama dan saudara perempuan Mauri menjadi buntut dari reaksi umum masyarakat terhadap menstruasi.

Rode adalah anak perempuan pertama di keluarganya. Ia menghabiskan masa kecilnya di Wamena, lantas berpindah menuju ibu kota Papua mengikuti sang ayah berkuliah. Pengalamannya peduli terhadap isu perempuan membangkitkan refleksinya terhadap budaya berdiam diri di honai selama menstruasi.

"[Saya] melihatnya dua sisi... perempuan jadi punya waktu untuk berdamai dengan dirinya, beristirahat di honai (rumah adat) selama 5-7 hari. Namun, di sisi lain, mungkin ia ada keinginan berinteraksi dengan orang lain, teman. Mau jalan tapi dibilang masa kotor. Itu dianggap tidak layak karena menjalani hari-hari yang kotor," kata Rode.

Rode menjadi salah satu kolaborator gerakan Perempuan Bantu Perempuan Pakai Pembalut Kain di Papua. Rode juga menjabat sebagai Ketua Departemen Perempuan GIDI.

Secara saintifik, darah menstruasi sesungguhnya terbentuk dari jaringan dan sel yang terkelupas di lapisan endometrium. Kita belajar melihat

menstruasi sebagai sesuatu yang hina atau kotor, seperti perenungan Rode.

Dulu, perempuan di komunitas adat terdekat dari Rode bahkan dilarang untuk beraktivitas di sungai, sementara di perkampungan akses air bersih justru dari aliran kali terdekat.

Temuan berbeda tentang menstruasi muncul dalam salah satu sesi pertemuan di Nabire. Kedatangan menstruasi pertama dalam budaya Suku Mee menyimbolkan masa depan dari seseorang melalui mimpi.

Sikap dan dukungan dari keluarga bergantung pada mimpi anak perempuan yang ia alami di malam-malam menstruasi pertama. Si ahli tafsir, yakni tetua adat perempuan lantas akan menerjemahkan mimpinya. Apabila mimpi buruk, maka keluarga membantu mengupayakan agar hal tersebut tidak terjadi di masa mendatang.

Pdt. Matheus Adadikam, satu dari dua laki-laki yang berpartisipasi dalam pelatihan itu mengatakan bahwa pengalaman menstruasi semakin mengerdilkan peran perempuan dan anak perempuan dalam adat.

"Ada rumah adat yang khusus laki-laki, perempuan, apalagi sedang menstruasi dilarang ke

sana karena dalam pemahaman adat akan membuat pertentangan. Misalnya, mereka mau pergi mencari (berburu) mereka bisa gagal. Di kampung-kampung bahkan perempuan yang sedang menstruasi tidak bisa campur dalam komunitasnya,” kata Matheus.

Saat itu hari Minggu. Jeremina Kio di usia remaja pergi beribadah. Setibanya di gereja, sang mama justru memintanya kembali ke rumah. Celana putihnya di bagian belakang ternodai warna merah.

Mamanya berbisik, “Eh ko pulang.. ko pulang! Pergi cari ko pu anak (keponakan)!”

Ia kebingungan, tapi mematuhi anjuran mama untuk pulang dan menemui Ame, keponakannya. Jarak usia antara Jeremina dan Ame tidak begitu jauh, namun pengalaman menstruasi Ame lebih awal sehingga ia langsung sigap membantu Jeremina.

Sembari memasang produk pembalut yang dibeli dari kios terdekat pada celana dalam Jeremina, Ame menjelaskan bahwa sebagai perempuan ia akan mengalami menstruasi tiap bulannya.

Para perempuan yang mengalami menstruasi bahkan kerap enggan membicarakan kondisi mereka. Ketika memang terpaksa membicarakannya harus berbisik-bisik atau lebih baik tidak sama sekali. Kata paling sering muncul adalah “sedang halangan” atau sekadar menyebut menstruasi sebagai sesuatu yang amat liyan, yakni “itu.”

Di Papua, mereka lebih fasih mengatakan “Ot-sus” ketimbang “mens-tru-asi” meski bukan bagian dari tubuhnya.

Jeremina mengakui sempat merasa aneh menceritakan pengalaman menstruasinya dalam sebuah forum publik, berhadapan dengan orang-orang yang beberapa diantaranya tidak ia kenali.

“Tapi saya begitu lihat semua perempuan bercerita, kita jadi belajar terbuka,” kata Jeremina, yang pernah mengikuti pertemuan edukasi Menstruasi Sehat dan Menjahit Pembalut Kain di Jayapura tahun 2020.

Ketika Perempuan Saling Membantu Perempuan

Seorang perempuan lanjut usia buru-buru mengangkat tangannya, meski bersusah payah. Ia duduk di bangku paling belakang, ditemani seorang perempuan lebih muda. Rupanya ia kesulitan berdiri

karena kakinya membengkak akibat penyakit gula. Ketika *microphone* masuk dalam genggamannya, ia mulai bertutur lantang.

“Ini dulu, sejak saya bertugas sebagai bidan tahun 1980-an, menstruasi jadi materi yang tersembunyi dan baru sekarang diangkat. Ibu-ibu sekalian, kita tidak boleh tabu bicara menstruasi. Barang ini milik kita sendiri,” katanya.

Workshop Menstruasi Sehat dan Menjahit Pembalut Kain merupakan bagian dari gerakan kolaborasi Perempuan Bantu Perempuan Pakai Pembalut Kain di Papua yang diusung oleh Biyung, Kewita, Perempuan GIDI, Bentara Papua, dan Elsham Papua sejak tahun 2020-2023.

Beberapa wilayah yang pernah disambangi adalah Sorong, Sorong Selatan, Pegunungan Arfak, Jayapura, Nabire, dan Wamena. Kongkalikong makin suam dengan keterlibatan 455 perempuan dan anak perempuan sebagai partisipan.

Bermula dari pertemanan, gerakan ini meluas secara organik. Dana untuk membiayai perjalanan keliling pun didapatkan melalui sokongan publik. Prinsip pada slogan “Perempuan Bantu Perempuan” nyatanya bukan hanya merangkul individu yang terlibat secara langsung dalam program workshop, juga masyarakat umum.

Kehadiran Biyung di Tanah Papua melalui proses yang tidak instan. Persahabatan dua perempuan yang pernah sekelas di bangku SMP kembali terhubung membicarakan peluang bekerja sama ini. Mereka adalah Westiani dan Rosa Moiwend. Menggunakan jejaring pertemanan dan kerja, keduanya mempromosikan inisiatif dengan menawarkan produk jualan, mulai dari sepaket pembalut kain hingga baju sulaman karya tangan Westiani.

“Waktu itu, Ani ada lihat bapa (saya) punya karya lukisan tanaman. Bentuknya seperti rahim. Lalu sama Ani dibikin sulaman,” tutur Rosa.

Dua tahun kemudian impian keduanya terwujud. Kehadiran pelatihan ini membuat pembalut kain disambut antusias oleh jaringan perempuan di Jayapura. Momen ini mempertemukan Biyung dengan Perempuan GIDI, yang spontan melibatkan diri dalam gerakan Perempuan Bantu Perempuan Pakai Pembalut Kain di Papua.

Melalui gerakan Perempuan Bantu Perempuan Pakai Pembalut Kain, perempuan yang

bermenstruasi bisa membantu sesama dengan memberikan bahan (kain) atau donasi senilai harga satu paket pembalut kain. Upaya ini bertujuan untuk mengakhiri period *poverty*, yakni keterbatasan akses mengelola kesehatan menstruasi melalui pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi, penyediaan produk menstruasi, dan sanitasi.

Jalinan berlanjut dengan pelaksanaan *workshop* lainnya dan gagasan pembentukan kelompok produksi di Oksibil. Informasi beredar meluas, gayung bersambut dari jaringan di luar Papua. Dana mulai mengalir dari Nona Woman, sebuah organisasi yang juga fokus memberikan akses pendidikan menstruasi dan memasarkan produk menstruasi yang lebih menyehatkan.

Melalui sebuah program *Giving Months* di perayaan Natal dan Tahun Baru, Nona Woman menyumbang 3 ribu potong pembalut kain. Sebuah yayasan bernama Nabung Donasi pun berkontribusi mendukung gerakan ini dengan menyumbang uang sebesar 14 juta rupiah. Selain itu, Dokter Tanpa Stigma, penggerak lainnya, ikut mengajak ikatan alumni kedokteran UNAIR berdonasi lewat kegiatan secara daring. Dalam kurun waktu beberapa jam, uang senilai 1,3 juta rupiah terkumpul. Giat kolaborasi ini merambah penggunaan platform Kitabisa.com sehingga sumbangan publik dapat terakomodir.

Pendapatan dari ragam dukungan dana bermuara pada pendistribusian pembalut kain kepada kelompok perempuan pengungsi politik dari Nduga yang diproduksi oleh sekelompok Perempuan GIDI di Oksibil.

Akibat konflik politik yang tak kunjung usai, perempuan Nduga harus menanggung kerugian, bukan hanya kesehatan secara fisik dan mental tapi juga terkait sistem reproduksinya. Mereka kehilangan akses akan sumber pangan, kesejahteraan, hingga manajemen kesehatan menstruasinya.

Rode mengungkapkan jumlah perempuan dan anak perempuan pengungsi konflik politik tersebar di beberapa daerah, di antaranya Pegunungan Oksibil, Puncak Jaya, Wamena, Intan Jaya, hingga ke perbatasan Papua Nugini. Akses untuk mencapai wilayah pengungsian

memakan biaya besar sehingga donasi pembalut kain terbatas ke tiga wilayah, yakni Oksibil, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.

Proses produksi dan pendistribusian dilakukan oleh jaringan Perempuan GIDI, namun Rode menolak menamakannya secara khusus.

Baginya, memberikan bantuan kemanusiaan tidak harus melihat denominasi gerejanya, “Tapi kita sedang sama-sama menghadapi situasi sulit maka kita berbagi bersama karena memang perempuan membantu perempuan!”

Usai pemerintah mencabut status pandemi COVID-19, Biyung bersama Perempuan GIDI mengorganisir perjalanan kembali pada tahun 2022. Pelaksanaan pelatihan edukasi menstruasi sehat dan menjahit pembalut kain yang semula direncanakan hanya di dua wilayah, Sentani dan Wamena, menggiatkan komunitas dan organisasi lainnya.

Elsham Papua, sebuah lembaga studi dan advokasi hak asasi manusia menyambut solidaritas yang dikabarkan oleh Parapara Buku, perpustakaan komunitas dan toko buku. Lebih dari sepuluh perempuan merespon dan bersedia berpartisipasi. Antusiasme yang mengemuka tak sebanding dengan biaya bahan dan alat menjahit pembalut kain, maka butuh keterlibatan pihak lainnya.

Berbekal pertemanan, Biyung dan Parapara Buku lantas menghubungi seorang staf Elsham, namanya Ani Sipa. Dalam sekejap Elsham menyanggupi kolaborasi.

“Ini memang pertama kali Elsham terlibat dalam kegiatan terkait kesehatan reproduksi, terutama menstruasi sehat. Namun saya rasa ruang untuk perempuan belajar seksualitas dan kesehatan reproduksi tidak berlebihan. Itu sesuatu yang seharusnya mereka dapatkan tanpa bersusah payah,” tutur (Pdt.) Matheus mengungkapkan alasan menyanggupi tawaran kolaborasi.

(Bersambung)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini adalah bagian dari serial #PendidikanSeksual.

Artikel ini bersumber dari: <https://projectmultatuli.org/bukan-lagi-baru-dan-tabu-perempuan-papua-bersolidaritas-saling-dukungan-kesehatan-menstruasi/>



BENGKEL KOMUNIKASI

Penulisan Kreatif dan Pengelolaan Website

Oleh **ITA IBNU**

Hadirnya internet di sekitar kita memberikan banyak dampak positif dalam kegiatan berorganisasi, tak terkecuali bagi organisasi nirlaba. Organisasi dapat mengambil manfaat dari pola pikir masa kini yang mengutamakan cara digital dan mengambil pendekatan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Transformasi digital itu sendiri adalah sebuah jalan yang panjang, bukan hanya tentang teknologi. Lebih jauh pada dasarnya tentang menghubungkan orang, proses, dan teknologi inovasi dan mendorong langkah perubahan.

Saat menerapkan transformasi digital, organisasi perlu mengevaluasi pendekatan yang mereka terapkan terhadap teknologi informasi

Foto bersama para peserta dan pemateri. Kegiatan ini menargetkan staf YESMa dan perwakilan dari Kelompok Konstituen.

Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

dan berinvestasi dalam strategi digital dalam jangka yang panjang. Berubahnya strategi digital juga mendukung organisasi dalam menghubungkan orang, proses, dan teknologi sedemikian rupa sehingga setiap aktivitas dari organisasi dapat menjangkau masyarakat luas, tepat sasaran serta memberikan dampak yang lebih besar.

Untuk itu diperlukan sebuah strategi digital, salah satunya dengan mempertimbangkan struktur dan kemampuan organisasi. Hal yang harus ditekankan bahwa anggota dan proses merupakan faktor yang penting dalam memanfaatkan kekuatan teknologi digital dalam mencapai tujuan. Untuk memperkuat strategi digital organisasi, Yayasan BaKTI melalui program Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) bersama dengan 6 mitra daerah menggelar Bengkel Komunikasi Penulisan Kreatif, Pengelolaan *Website*, Publikasi Media. Toraja dan Ambon menjadi lokasi kedua pelaksanaan Bengkel Komunikasi setelah sebelumnya pada bulan Maret 2023 diadakan di Kota Kupang.

Bengkel Komunikasi merupakan salah satu dari sejumlah aktivitas peningkatan kapasitas mitra daerah sesuai dengan kebutuhan mitra daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan *website* mitra sebagai media informasi dan advokasi untuk mendorong promosi, advokasi dan replikasi



Selain mendapat pengetahuan teknis mengenai pembuatan dan pengelolaan website, peserta juga peserta dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menulis kreatif.

Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

program. Dengan media *website* akan lebih mudah menjangkau serta dapat menunjang keberlangsungan sebuah lembaga yang memiliki *website* untuk mempromosikan kegiatan mereka sehingga tidak menutup kemungkinan mampu mendorong advokasi dan peluang kerja sama dengan melihat informasi yang disajikan di *website*. Selain itu *website* dapat digunakan sebagai tempat publikasi dan penyimpanan aset lembaga. Dengan memiliki *website* resmi akan lebih memudahkan mitra dalam menjalin sebuah komunikasi, menjangkau audiens yang lebih luas.



Ruang Lingkup Manajemen Website

Setidaknya ada empat hal yang dilakukan seorang “manajer web” atau pengelola *website*.

1 Maintenance (Pemeliharaan)

Pemeliharaan *website* adalah proses menjaga agar *website* tetap mutakhir (*update*) dan berjalan dengan lancar serta berkinerja optimal. Pemeliharaan *website* mencakup tugas-tugas seperti memastikan semua tautan di *website* berfungsi, memperbarui konten secara teratur, dan memperbaiki tautan yang rusak (*broken link*).

Bagian dari *maintenance* adalah perpanjangan *domain* dan *hosting*. Biasanya, sewa *domain* dan *hosting* dilakukan per tahun. Jika tidak diperpanjang, atau terlambat dibayar, maka *website* akan mati karena *domainnya* kadaluwarsa.

2 Troubleshooting (Pemecahan masalah)

Website sering mengalami masalah jika kode tidak berfungsi atau ada gangguan *server*. Dalam banyak kasus, *website* bisa mengalami *error 500 internal server*, *error 404 not found*, dan banyak lagi.

3 SEO

SEO adalah kependekan dari *Search Engine Optimization* atau pengoptimalan mesin pencari/ Teknik ini merupakan upaya mengoptimasi *website* agar mendapat ranking teratas di hasil pencarian Google. Mengoptimalkan *web* agar mudah diindeks dan diperingkat tinggi mesin pencari merupakan bagian manajemen *website*.

4 Updating (Memperbarui)

Update konten web masuk juga bagian SEO karena SEO terbaik tetap pada konten berkualitas. *Content is King*. Konten *web* secara umum terdiri dari halaman statis (*static page*) dan halaman postingan (*postpage*) yang dinamis.

Page. Halaman misalnya Tentang (*About*), Kontak, *Disclaimer*, *FAQ*, *Privacy Policy*.

Post. Postingan adalah konten dinamis *website* berupa tulisan (artikel, berita), gambar (foto), audio, video, ataupun konten multimedia.

Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang bersifat teknis mulai dari penyiapan, fungsi dan di tahap akhir praktik pembuatan dan pemanfaatan *website* mitra. Bengkel Komunikasi di Toraja diadakan pada tanggal 21-22 Agustus. Kegiatan diikuti oleh staf YESMa dan perwakilan dari Kelompok Konstituen. Di Ambon, Bengkel Komunikasi diadakan pada 12-14 September dan diikuti oleh staf Rumah Generasi dan perwakilan Kelompok Konstituen.

Di hari pertama Bengkel Komunikasi kami bertukar pengalaman dan berbagi tips dalam hal menulis kreatif, termasuk tips membuat

judul yang menarik dan topik-topik terkait pembangunan inklusif yang menjadi tema Program INKLUSI - BaKTI. Walaupun telah sering menulis, ternyata tidak mudah mengangkat tulisan bertema inklusi. Seringkali ada bias saat menuliskan cerita keren mengenai teman difabel. Kami juga berdiskusi seru tentang bagaimana meningkatkan perhatian publik tentang isu-isu inklusi.

Mengelola website lembaga pun memiliki tantangan dan menjadi diskusi yang seru. Bagaimana sebuah tulisan menjadi konten menarik di website, memerlukan perhatian bersama, kehati-hatian, dan kreativitas!

Manajemen Situs Web Lembaga

Empat cara mengelola website yang bisa bermanfaat bagi Anda

1 Knowledge Center
(Jadikan Pusat Pengetahuan)
Jadikan situs *web* sebagai pusat pengetahuan. Bicaralah dengan berita. Untuk mempromosikan apa yang organisasi lakukan, hendaknya dapat memberikan wawasan tentang apa yang sedang terjadi dan mengapa hal itu penting bagi pengunjung.

2 Perbarui Secara Terus-Menerus
Update konten sangat penting. Untuk memaksimalkan potensi halaman situs *web*, Anda harus ingat untuk memperbarui dan memelihara konten di situs *web* tersebut secara rutin.

3 Tambahkan Konten Video, Foto dan Visual Menarik
Video dan foto adalah alat pemasaran No.1 Anda di tahun 2020 karena itulah cara orang mengonsumsi konten saat ini. Sebagai ilustrasi, menambahkan video ke situs web meningkatkan lalu lintas pencarian organik sebesar 157% dan

meningkatkan tingkat konversi hingga 80%. Luangkan waktu untuk memfilmkan video yang informatif dan berharga dan sematkan di beranda Anda. Ini pasti akan menciptakan kesan pertama yang positif.

4 Jangan Lupakan Pintu Depan Media Sosial Anda

Optimalkan akun media sosial untuk mendukung situs *web* Anda! situs *web* sering menjadi hasil pencarian teratas, tetapi kemungkinan di tiga hasil teratas mungkin juga halaman media sosial organisasi.

Memastikan bahwa setiap “pintu depan” yang diputuskan pengunjung untuk dimasuki dikurasi, diperbarui, dan sesuai serta sama pentingnya. Anda tidak hanya harus memastikan bahwa situs *web* Anda memiliki tautan sosial yang berfungsi, tetapi juga harus memastikan halaman media terhubung dengan mudah ke situs *web* Anda!

Setelah *website* tersedia, PR berikutnya adalah mengelola situs *web* sehingga mitra dapat memperoleh hasil yang optimal dari situs *web* tersebut.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-Yayasan BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



Foto: Tangkapan layar film sosialisasi Program Mama Bo'i/
Dinas Kesehatan Pemkab. Rote Ndao

Mama Bo'i Menjaga Ibu dan Bayi di Rote Ndao

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Pada tahun 2021 di Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT, kematian ibu tercatat sebanyak 10 orang dan kematian bayi sebanyak 53 orang. Selama ini pelayanan terhadap ibu dan anak di kabupaten di ujung selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini cenderung sektoral dan tidak terintegrasi. Selain itu, kasus pulang paksa masih jamak ditemui karena banyak ibu yang enggan bersalin di fasilitas kesehatan. Faktor terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk ke fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan juga menjadi penyebab.

Bertolak dari permasalahan di atas, analisis terhadap faktor penyebab dilakukan. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa sebagian besar kasus kematian di Kabupaten Rote Ndao terjadi karena faktor keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat akar rumput. Mengingat pentingnya peranan dari akar rumput terhadap pengambilan keputusan ibu hamil untuk dapat bersalin di fasilitas kesehatan serta pentingnya integrasi data layanan ibu dan bayi di Kabupaten Rote Ndao, maka hadirilah Inovasi Mama Bo'i atau Mama Tersayang.

Inovasi Mama Bo'i adalah inovasi yang memberi layanan ibu dan bayi yang terintegrasi dan berbasis komunitas dengan melibatkan peran aktif lintas sektor untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao berkomitmen untuk mengeliminasi kematian ibu dan bayi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Rote Ndao. Regulasi di atas menjadi dasar pijak untuk kerja sama lintas sektor sekaligus pembentukan inovasi Mama Bo'i sebagai sistem layanan rujukan terintegrasi berbasis komunitas di Kabupaten Rote Ndao.

Inovasi ini didesain dengan tujuan untuk memastikan peran serta lintas sektor tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten untuk mendukung layanan ibu dan bayi termasuk pengambilan keputusan tingkat keluarga sehingga ibu dapat bersalin di fasilitas kesehatan dan tidak pulang paksa. Peran aktif tersebut bertujuan untuk mencegah keterlambatan pengambilan keputusan serta mencegah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rote Ndao.

Mama Bo'i memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan bayi. Inovasi ini menyentuh langsung kebutuhan ibu dan bayi serta masyarakat akar rumput sebagai jaring pengaman ibu hamil. Berbagai layanan inovasi Mama Bo'i seperti pendataan pada ibu hamil dan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai *user* Mama Bo'i. Selain itu, layanan Mama Bo'i diarahkan agar ibu hamil pada akhirnya dapat dirujuk dan bersalin di fasilitas kesehatan.

Ada tiga pilar penting dalam Mama Bo'i. **Pertama**, komitmen kepala daerah. **Kedua**, kolaborasi terpadu lintas sektor dengan jaring pengaman ibu hamil. Pemangku kepentingan di sini termasuk perangkat daerah terkait. Selain itu, terdapat sembilan jaring pengaman ibu hamil yang terdiri dari suami, keluarga ibu hamil, kader desa, bidan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, calon pendonor, kepala desa/lurah, dan camat. Kesembilan *safety net* diatas disebut Sio Sodak. Para Sio Sodak dan pemangku kepentingan inilah yang menjadi pengguna informasi yang dihasilkan oleh aplikasi Mama Bo'i. **Ketiga**,

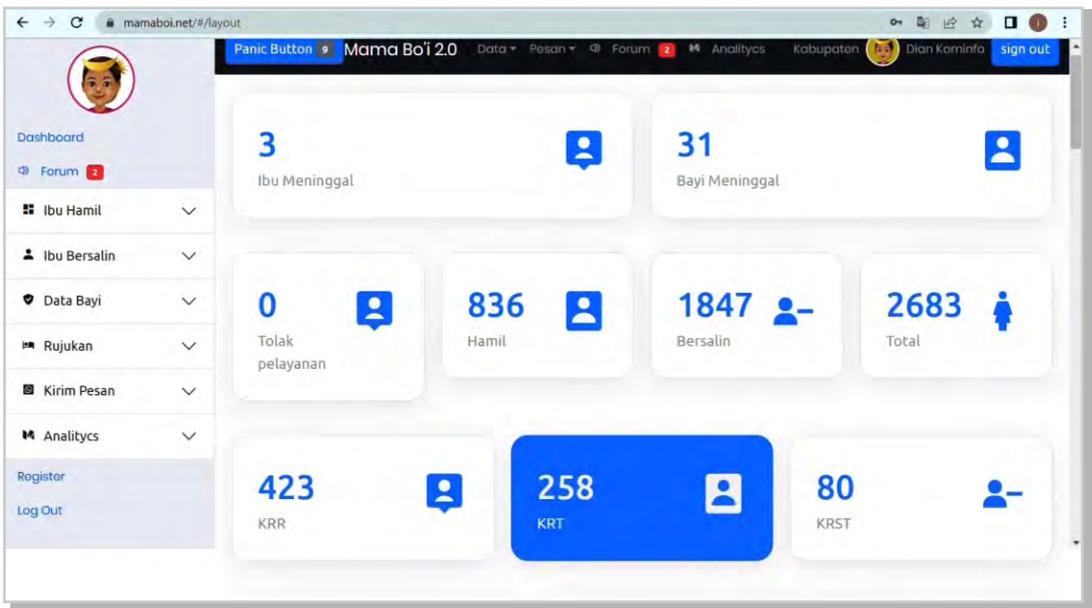
penggunaan teknologi digital berupa aplikasi berbasis *web* dan media sosial (grup WhatsApp).

Inovasi Mama Bo'i adalah inovasi berbasis teknologi dalam bentuk aplikasi. Terdapat tujuh (7) fitur utama pada web aplikasi Mama Bo'i, yaitu: **Pertama**, *panic button* di mana jika terjadi kasus gawat darurat, maka bidan dapat melapor ke Sio Sodak; **Kedua**, *dashboard* yang menampilkan data utama dan analisa data ibu hamil dan bayi; **Ketiga**, data kohort ibu hamil bagi bidan; **Keempat**, data 2M40H (2 Minggu 40 Hari), yaitu ibu hamil yang akan bersalin dalam 2 minggu dan data bayi baru lahir sampai usia 40 hari; **Kelima**, peta sebaran ibu hamil per desa; Keenam, fitur pesan kepada komunitas Sio Sodak untuk edukasi; dan **Ketujuh**, forum antar bidan untuk kepentingan komunikasi antar bidan.

Sekretariat bersama Mama Bo'i menjalankan layanan operasional di tingkat kabupaten. Selain itu, di lapangan terdapat 119 bidan desa dan 12 bidan puskesmas yang merupakan user tetap Mama Bo'i. Penginputan pada web aplikasi Mama Bo'i menggunakan komputer di kabupaten dan *user* di lapangan menggunakan laptop dan HP untuk mendata, memantau, dan menginformasikan kejadian gawat darurat, rujukan dan pelayanan di desa dan puskesmas.

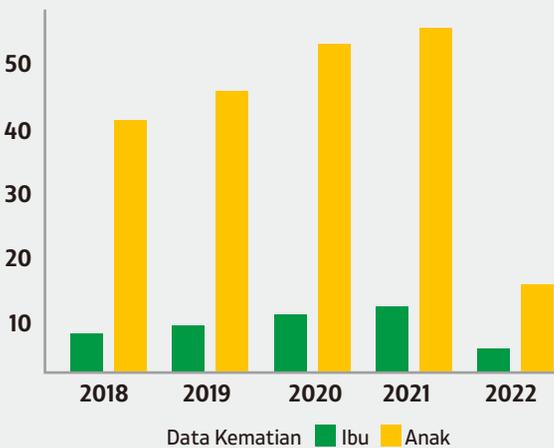
Secara teknis, data ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir diinput ke dalam aplikasi Mama Bo'i oleh *user*. *User* kabupaten menghimpun data dari aplikasi dan menyampaikan pada pengambil kebijakan di grup WhatsApp "Rote Bebas AKI/B" yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Asisten Administrasi Umum, para kepala perangkat daerah terkait, fasilitator kabupaten program Momentum USAID, para camat, kepala puskesmas dan seluruh bidan koordinator. Penyampaian data ini berlangsung secara rutin setiap 2 minggu sekali. Sedangkan data terkait kegawatdaruratan disampaikan secara kasuistik. Para pimpinan lalu mengevaluasi dan memutuskan tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kondisi layanan kesehatan ibu dan anak. *User* Mama Bo'i secara rutin mengirimkan pesan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada Sio Sodak.

Selain membenahi data, teknis penanganan kasus juga diperkuat dengan mewajibkan setiap kader mendampingi ibu hamil. Kapasitas tenaga Puskesmas Mampu PONE (Pelayanan Obstetri



Tampilan web aplikasi Mama Bo'i.

Data Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Rote Ndao 2018-2022



Hasil Inovasi Mama Bo'i menunjukkan Kematian Ibu/Anak menurun pada tahun 2022

- Kasus kematian ibu dari angka 10 tahun 2021 menurun menjadi 3 kasus tahun 2022
- Kasus kematian anak dari angka 53 tahun 2021 menurun menjadi 17 kasus tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Pemerintah Kab. Rote Ndao

Neonatal Emergensi Dasar) juga dikuatkan melalui pelatihan tenaga kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah memperkuat jaring pengaman sosial ibu guna mencegah keterlambatan pengambilan keputusan di lapangan.

Perubahan yang Terjadi

Secara berkala, pelaksanaan inovasi Mama Bo'i dievaluasi melalui rapat Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan *Stunting*, Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi tingkat Kabupaten.

Sejak Inovasi Mama Bo'i diterapkan, jumlah kematian ibu menurun dari 10 kasus pada tahun 2021 menjadi 6 kasus pada tahun 2022. Tahun 2023 hingga Juni terdapat 1 kasus kematian ibu. Jumlah kematian bayi menurun dari 53 kasus pada tahun 2021 menjadi 28 kasus pada tahun 2022. Tahun 2023 hingga Juni terdapat 13 kasus kematian bayi. Tahun 2021 banyak kasus pulang paksa yang tidak tertangani, sedangkan tahun 2022 seluruh kasus pulang paksa berhasil ditangani oleh Sio Sodak. Tahun 2021 hampir tidak terdapat kontribusi Sio Sodak, tetapi sejak tahun 2022 pengambilan keputusan pada tingkat rumah tangga dilakukan lebih cepat karena keterlibatan Sio Sodak. Perubahan dievaluasi dan dimonitor melalui aplikasi Mama Bo'i dengan biaya operasional yang sedikit, tetapi berdampak besar.

Sejak Juni-Desember 2022 tidak terdapat kasus pulang paksa. Secara total terdapat 23 kasus pulang paksa tahun 2022. Sejak Januari-Juni 2023 terdapat 1 kasus pulang paksa yang dicegah.

Hal yang membanggakan serta kunci sukses dari inovasi ini yang dapat direplikasi di wilayah lain adalah adanya komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan inovasi, kolaborasi terpadu



Aplikasi Mama Bo'i dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat lewat smartphone.

Sumber: **Dinas Kesehatan Pemkab. Rote Ndao**

lintas sektor; dan tak kalah pentingnya adalah penggunaan teknologi digital yang terintegrasi dengan model *smart service*.

Jika ingin mereplikasi inisiatif ini, 3 langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah **1** Pemetaan potensi jaring pengaman ibu hamil secara sosio-kultural dan demografis; **2** Koordinasi layanan data ibu dan anak secara lintas sektor di bawah Bapelitbang; dan **3** Pengambilan keputusan cepat serta evaluasi secara rutin berbasis aplikasi.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Sejak awal, pengembangan gagasan inovasi Mama Bo'i dilakukan secara kolaboratif oleh tiga instansi, yakni dinas kesehatan, Bappelitbang dan Dinas KISP (Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian). Inovasi Mama Bo'i menciptakan konektivitas lintas perangkat daerah yang melibatkan dinas kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dinas sosial, dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, inovasi ini juga melibatkan interkoneksi dengan Sio Sodak yang berperan mencegah keterlambatan pengambilan keputusan dan mencegah kasus pulang paksa.

Inovasi Mama Bo'i menggerakkan pihak-pihak terkait, di antaranya kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pelindung dan penanggung jawab, kepala Bappelitbang dan kepala dinas sebagai pengarah turut mengevaluasi kegiatan Mama Bo'i. Layanan KIA juga dievaluasi oleh lintas perangkat daerah, di antaranya kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa yang turut menggerakkan masyarakat, kepala dinas DP3AP2KB, kepala dinas sosial, kepala dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pengelola kesehatan ibu dan anak di dinas kesehatan, dokter SpOG, dokter spesialis anak, seluruh bidan di puskesmas, di desa/kelurahan dan di rumah sakit, kepala puskesmas, kepala desa/lurah, dan Program Momentum USAID sebagai lembaga pembangunan internasional yang berperan aktif dalam mendukung dan memfasilitasi pelayanan ibu dan bayi di Kabupaten Rote Ndao.

Ada banyak pihak serta jaring pengaman sosial ibu hamil yang punya semangat untuk turut berkontribusi dan berkolaborasi dalam upaya pencegahan kematian ibu dan bayi di Rote Ndao. Hal ini terwujud dalam kerja kolaborasi lintas sektor yang dihadirkan dalam inovasi Mama Bo'i. "Satu kematian terlalu banyak karena semua ibu melahirkan adalah mama kita dan semua bayi adalah adik kita."

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih jauh mengenai inisiatif ini Sahabat BaKTI dapat menghubungi: Maryam Selly (mama.boi.ronda@gmail.com)



FORUM KEPALA BAPPEDA PROVINSI SE-KTI SINKRONISASI RPJPD TERHADAP RANCANGAN AKHIR RPJPN 2025-2045

Oleh **ITA IBNU**

Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui 3 area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Dalam menggapai cita-cita besar tersebut, Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” di Djakarta Theater, Jakarta tanggal 15 Juni 2023. Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, dengan kemiskinan mendekati 0 persen dan ketimpangan berkurang.

Presiden menegaskan, ada tiga hal pokok yang menjadi acuan pembangunan Indonesia, yakni stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, penyusunan RPJPN 2025-2045 yang berperan sebagai dokumen perencanaan pembangunan 20 tahunan tersebut di mana dalam prosesnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi untuk menajamkan target dan sasaran pembangunan agar mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Yayasan BaKTI melalui dukungan Program SKALA melaksanakan Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI. Pertemuan ini bertujuan untuk menjembatani Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri serta para pemangku kepentingan lain dengan pihak Bappeda/Bappelitbangda provinsi se-KTI untuk membahas



Astrid Kartika, (kanan) bersama Winarni Monoarfa saat memberi sambutan pada kegiatan ini. Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

arah kebijakan pembangunan jangka panjang wilayah dalam RPJPN 2025 – 2045. Forum Kepala Bappeda Se-KTI ini berfokus untuk meningkatkan koordinasi pembangunan antar-pemerintah daerah juga antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta senantiasa berbagi praktik baik dalam bidang perencanaan pembangunan.

Melalui pertemuan ini diharapkan Kementerian PPN/Bapenas, Kementerian Dalam Negeri, Bappeda Provinsi Se-KTI serta para pemangku kepentingan lainnya bersama-sama membangun kolaborasi membangun sinergitas untuk arah kebijakan, membahas terkait dengan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai dengan 2045. Diperkuat dengan pemaparan dari ketiga narasumber yang hadir langsung di lokasi pertemuan yaitu Sondang Lumban Gaol, S.SOS., M.ENG – Analis Kebijakan Ahli Madya Selaku Koordinator (Perencanaan Dan Evaluasi Wilayah IV) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri. Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D - Direktur Regional II Kementerian PPN/BAPPENAS (Pulau Sulawesi dan Provinsi Nusa Tenggara Barat/NTB) serta Ika Retna Wulandary, S.T., M.Sc. - Direktur Regional III Kementerian PPN/ BAPPENAS (Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT, Maluku, Maluku Utara, dan seluruh provinsi di Tanah Papua). Bapak Roudo

dan Ibu Ika secara khusus memaparkan tentang isu, potensi dan arah kebijakan di masing-masing wilayah di KTI. Ibu Sondang dalam pemaparannya menekankan pemerintah daerah perlu segera menyiapkan berbagai keperluan dalam rangka melaksanakan agenda strategis penyusunan dokumen perencanaan daerah di tahun 2023-2024 dari mulai penyusunan RPJPD, RPJMD dan juga RKPD yang dilakukan secara simultan dan serentak di seluruh wilayah; RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik disusun pada tahun 2024 sebagai pedoman bakal calon kepala daerah dalam merumuskan visi misinya; terakhir penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Beberapa hal-hal tersebut di atas perlu dikomunikasikan agar pemerintah daerah juga mendapatkan arahan terkait peran dan kontribusi masing-masing provinsi dalam rangka untuk melakukan sinkronisasi muatan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana jangka panjang nasional 2025 sampai dengan 2045 serta memberikan tanggapan terkait upaya kolaborasi multi pihak dan kesiapan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

“Kawasan Timur Indonesia adalah kawasan yang sangat beragam dengan karakteristik yang berbeda-beda yang meliputi wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Oleh karena itu, hari ini adalah momentum yang sangat strategis ini menyampaikan masukan-masukan,



tanggapan sehingga benar-benar rencana pembangunan dokumen RPJPN dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan dan kebutuhan dari wilayah-wilayah yang ada di kawasan Timur Indonesia. Kita berharap nantinya masukkan ini tentu menjadi perhatian dan respons yang positif dari pemerintah nasional melalui Bappenas dan Kemendagri”, himbau Prof. Winarni Monoarfa, MS selaku Ketua Pokja Forum KTI dalam sambutan pembukaan.

Tahun 2023 hingga 2024 merupakan tahun yang penting di mana Indonesia memasuki pesta demokrasi, akan ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi baik di pusat maupun di daerah, dan saat ini Bappenas, Kemendagri dan juga Kementerian lain tengah gencar-gencarnya menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik itu jangka menengah maupun jangka panjang, momen ini merupakan sebuah kesempatan penting bagi kita semua untuk membuat transformasi pembangunan yang baik di Indonesia. “Penting untuk memastikan kebijakan pusat betul-betul bisa nyambung dengan kebijakan dan arahan yang diterima oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, untuk itu perlu penguatan koordinasi pusat dan daerah dan antar daerah. Dukungan yang diberikan oleh mitra pembangunan salah satunya melalui Program SKALA diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan tersebut.” Ungkap Ibu Astrid Kartika, *Unit Lead - Decentralized Governance and Human Development Branch Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australian Embassy Jakarta* dalam sambutan pembukaan. Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) merupakan kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar yang berfokus pada

Para narasumber dari Kementerian PPN/BAPPENAS, Mohammad Roudo (kiri), dan Ika Retna Wulandary (tengah) serta dari Kementerian Dalam Negeri, Sondang Lumban Gaol (kanan).
Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia, seperti Manajemen Keuangan Publik (PFM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), perencanaan dan penganggaran, dan kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial).

Visi Indonesia Emas 2045 ini dicerminkan dalam 5 sasaran yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan jangka panjang. Sasaran yang pertama, yaitu “Pendapatan per Kapita Suatu Negara Maju” dengan indikator meningkatnya GNI per Kapita menjadi USD 23.000-30.300; meningkatnya kontribusi PDB Maritim sebesar 15,0%; serta meningkatnya Kontribusi PDB Manufaktur sebesar 28,0% di tahun 2045.

Selanjutnya, sasaran yang kedua yaitu “Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang” diterjemahkan dengan indikator menurunnya persentase Tingkat Kemiskinan menjadi 0,5-0,8%; menurunnya Rasio Gini menjadi 0,290-0,320; serta meningkatnya kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDB menjadi 28,5%. Sasaran yang ketiga, “Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat” diukur dengan meningkatnya *Global Power Indeks* menjadi 15 besar. Lalu, sasaran yang keempat melihat pada “Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat” dengan indikator meningkatnya dari *Human Capital Index (HCI)* menjadi 0,73. Sasaran yang terakhir berfokus pada keberlanjutan, yaitu



“Intensitas Emisi GRK Menuju *Net Zero Emission*” dengan penurunan menjadi 93,5 %.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut, ditetapkan 8 Misi yang dijabarkan dalam 17 Arah Pembangunan. Langkah reformasi tidak akan cukup untuk pendekatan pembangunan Indonesia, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi yang menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Tiga fokus utama transformasi ini meliputi “Transformasi Sosial”, “Transformasi Ekonomi”, dan “Transformasi Tata Kelola”. Ketiga transformasi ini dapat berjalan dengan baik dengan ditunjang oleh landasan stabilitas nasional yang kuat, yang meliputi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Selain itu, landasan transformasi “Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi” juga diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan ke depan. Transformasi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut akan diterjemahkan ke dalam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang didukung penuh oleh pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kaidah pelaksanaan untuk kesinambungan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan kewilayahan, saat ini Indonesia masih dihadapkan pada isu ketimpangan antar wilayah khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi perlu diprioritaskan di wilayah yang berstatus *Lower-Middle Income*.

Oleh sebab itu, untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, dengan kontribusi KTI yang ditargetkan tinggi pada tahun 2045 sebesar 28,5%, dari Wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan dengan

memanfaatkan potensi besar di wilayah timur yang berupa pariwisata dan ekonomi kreatif di Wilayah Bali-Nusa Tenggara, serta perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Untuk memperbesar kontribusi KTI terhadap perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi harus tumbuh 7-8,1%, Bali-Nusa Tenggara mesti tumbuh 5-7%, Maluku 7-14%, dan Papua tumbuh 6-7%. Target pertumbuhan yang dihadapkan terjadi di masing-masing region di KTI menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan transformatif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan pendekatan *business as usual*.

Dalam sambutan sekaligus membuka pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI, Ibu Sri Dewi Virgiyanti, ST, MEM - Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional - Kementerian PPN/BAPPENAS yang hadir secara *online* melalui Zoom, beliau menyampaikan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama, yaitu: **Pertama**, dalam mendorong peningkatan peranan KTI ke depan, diperlukan berbagai upaya dan langkah strategis yang bersifat *game changers* di seluruh wilayah di KTI baik dalam upaya transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi tata kelola, maupun dalam memperkuat supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Hal ini tentunya dengan memanfaatkan peluang ekonomi dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan 6 (enam) klaster industri dan 2 *enabler*.

Kedua, penyusunan RPJPD serta rencana tata ruang dan sektoral harus selaras dan sinkron dengan RPJPN 2025-2045, baik secara substansial maupun periodisasinya. Dalam upaya penyalarsan tersebut, penyusunan RPJPD ini juga diharapkan mengadopsi berbagai pembelajaran/praktik cerdas pada seluruh aspek pembangunan. Terakhir, seluruh upaya percepatan pembangunan di KTI tidak terlepas dari peran serta seluruh *stakeholders* pembangunan baik pemerintah maupun non pemerintah. Upaya kolaborasi dengan seluruh *stakeholders* pembangunan agar kebijakan-kebijakan pembangunan dapat bersifat transformatif dalam rangka percepatan pembangunan KTI dan

FORUM KEPALA BAPPEDA PROVINSI SE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TERHADAP RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RANP) 2025

Assar, 26 September 2025



Kegiatan yang dihadiri oleh para Kepala Bappeda Provinsi se-KTI ini ditutup oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si. (duduk, tengah) Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

berkontribusi bagi tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Agar kontribusi KTI terhadap perekonomian nasional bisa diwujudkan, pemerintah pusat melakukan pemetaan arah pembangunan masing-masing region di KTI. Pemetaan tersebut didasarkan pada potensi atau modal dasar yang dimiliki semua daerah di KTI. Harapan Pemerintah pusat berharap prioritas pembangunan jangka panjang untuk Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai “Penunjang Ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Industri berbasis SDA” yang berperan sebagai wilayah penyangga IKN dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Regional Sulawesi perlu mendorong pembangunan sumber daya manusia, mendorong pembangunan ekonomi terutama pada penguatan rantai nilai produksi dan rantai nilai komoditas-komoditas unggulan seperti kopi, kakao, kelapa, perikanan, memperkuat konektivitas melalui pembangunan sarana prasarana, melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, dan memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan sosial.

Di Regional Bali-Nusa Tenggara, pemerintah pusat berharap pembangunan wilayah diarahkan untuk menjadikan Regional Bali dan Nusa Tenggara sebagai “*Superhub* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara yang Bertaraf Internasional” yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke Wilayah Timur Indonesia.

Pembangunan Wilayah Maluku untuk 20 tahun mendatang diarahkan sebagai “*Hub* Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia” dengan koridor ekonomi yang difokuskan sebagai “*Hub* Ekonomi Biru Timur Indonesia” melalui pendayagunaan sumber daya kelautan dengan tetap mengoptimalkan sumber daya lainnya berdasarkan prinsip berkelanjutan. Arah Pembangunan tersebut bisa dicapai jika terjadi Pengembangan sentra-sentra industri yang dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi, Pengembangan kawasan pariwisata dengan kelas premium dan *mass tourism*, Optimalisasi kawasan-kawasan pertumbuhan eksisting, penguatan produktivitas dan daya saing SDM lokal, pembangunan pelabuhan transit *Hub* domestik dan pusat logistik, penguatan tata kelola wilayah, dan peningkatan masyarakat yang berbudaya dan tangguh dalam mengelola lingkungan dan sumber daya Pembangunan.

Pembangunan Wilayah Papua selama 20 tahun mendatang diarahkan pada “Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif” untuk mewujudkan Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan wilayah. Untuk Papua Produktif, koridor ekonomi Wilayah Papua difokuskan pada Industri Kimia Dasar dan Agro. Untuk mencapai kondisi tersebut, pembangunan wilayah mesti diarahkan pada pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan pendidikan sepanjang hayat, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, peningkatan inovasi dan tata kelola layanan kesehatan dan pendidikan,



penguatan sentra-sentra produksi, dan beberapa arah kebijakan lain yang berkaitan dengan pariwisata dan infrastruktur dasar.

Arah Pembangunan region Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua potensial diwujudkan karena didukung oleh sumber daya alam yang memadai. Meski begitu, tantangan masing-masing daerah di masing-masing region bisa menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalkan sumber daya alam untuk memenuhi harapan nasional terhadap KTI. Beberapa tantangan relatif sama antar region seperti masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan konektivitas, masih tingginya ketimpangan pendapatan, keterbatasan infrastruktur, dan keterbatasan kapasitas fiskal. Ada beberapa daerah yang memiliki tantangan khusus seperti kondisi iklim (musim kering yang panjang) di Provinsi NTT, Sebagian besar wilayah masuk dalam Kawasan hutan sehingga mengalami keterbatasan dalam mengelola

potensi daerah dialami oleh Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

“Pembangunan harus dilihat dari Laut, Udara dan Darat. Membuka akses dan mengoptimalkan konektivitas jalur perdagangan antar daerah di Kawasan Timur Indonesia menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak di mana selama ini masih bertumpu pada beberapa titik di kawasan barat Indonesia” ungkap Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si dalam sambutan penutup yang turut memperkaya perspektif para peserta yang hadir kala itu.

Menurutnya saat ini bukan lagi berbicara mengenai ketimpangan timur dan barat tapi sebenarnya bukan sekedar lagi kawasan timur atau barat Indonesia, tapi ketimpangan antara Indonesia lintang utara dengan Indonesia lintang selatan, di mana jalur-jalur perdagangan masih berpusat di beberapa wilayah di Sumatera, Jawa dan Kalimantan, merunut dari sejarah panjang Indonesia di mana pedagang-pedagang dari Portugis hanya melalui Selat Malaka, kemudian diambil alih oleh Belanda-VOC yang membangun pelabuhan di Batavia dan di Kutai. Salah satu upaya membangun konektivitas antar wilayah, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Jokowi Widodo telah membangun Tol Laut sebagai suatu bentuk konektivitas antarwilayah melalui optimalisasi perhubungan laut untuk memperlancar distribusi barang, jasa, hingga modal dan menjadi daya ungkit untuk berbagai sektor pembangunan.

Dalam pertemuan ini mengemuka beberapa permasalahan dan aspirasi pemerintah provinsi se-KTI sebagai berikut.

Potensi Kewilayahan Sebagai Modal Dasar Pembangunan Wilayah

Provinsi di KTI memiliki potensi sumber daya, meliputi pertanian, perikanan, pertambangan, energi, dan pariwisata. Namun potensi ini belum dikelola secara optimal. Jika berhasil dikelola secara optimal, maka harapan nasional agar KTI berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

Sejumlah sektor yang menjadi penopang perekonomian provinsi merupakan sektor-sektor yang non-padat karya,

sehingga belum sepenuhnya optimal dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Beberapa provinsi mendorong isu pengembangan energi baru terbarukan seperti Provinsi NTT yang memiliki potensi tenaga surya dan ombak, Papua Barat Daya yang memiliki potensi air. Namun untuk memanfaatkan potensi tersebut menjadi sumber energi baru terbarukan, salah satu tantangannya adalah keterbatasan anggaran. Jika APBN dan APBD kesulitan untuk membiayai pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan, maka dibutuhkan peran investasi swasta.

Sektor pariwisata merupakan satu sektor potensi untuk dikembangkan di KTI, misalnya di Papua Barat Daya dan Sulawesi Selatan.

Salah satu potensi yang dimiliki oleh provinsi di KTI adalah pengembangan ekonomi biru. Hal ini didukung oleh panjang garis pantai dan luas laut yang dimiliki, seperti di NTT dan Sulawesi Tengah.

Kualitas dan Produktivitas SDM, Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Secara umum, kualitas SDM masih relatif terbatas dibandingkan wilayah lain di Kawasan Barat Indonesia. Hal ini dipengaruhi rendahnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya IPM di semua provinsi di KTI. Beberapa daerah misalnya Sulawesi Barat menghadapi persoalan tingginya angka anak tidak sekolah dan terbatasnya akses terhadap pendidikan untuk daerah-daerah terpencil.

Pada aspek kesehatan, salah satu isu penting yang menjadi perhatian semua provinsi adalah *stunting* yang masih tinggi. Hal itu disebabkan oleh akses pelayanan kesehatan yang masih terbatas, terutama daerah-daerah yang sulit diakses. Keterbatasan akses tersebut bisa dilihat ketersediaan tenaga kesehatan yang tidak sejalan jumlah penduduk yang terus bertambah.

Tata Kelola, Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kualitas manusia Aparat Sipil Negara (ASN) yang masih kurang kompeten dan melek teknologi informasi turut menjadi isu tata kelola pemerintahan di KTI. Sehingga diperlukan pengembangan kapasitas manusia ASN melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Penguatan tata kelola pemerintahan juga perlu didorong melalui penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta manajemen ASN.

Dukungan Sarana Prasarana, Konektivitas dan Kebencanaan

Konektivitas antar wilayah provinsi dan antar wilayah dalam provinsi masih rendah, sehingga diperlukan dukungan untuk pengembangan infrastruktur konektivitas, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan di hampir semua provinsi KTI seperti di Provinsi Sulawesi Tengah. Infrastruktur teknologi penting untuk masa depan karena dalam jangka panjang pemanfaatan kebutuhan untuk akses teknologi diperkirakan akan meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga perlu dipastikan bahwa semua provinsi di KTI memiliki akses yang memadai dalam infrastruktur teknologi.

Beberapa provinsi di KTI termasuk dalam kategori rawan bencana, seperti Sulawesi Tengah, Papua Selatan. Kondisi geografis yang rawan bencana perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.

Beberapa provinsi memberikan tanggapan terkait dengan infrastruktur spesifik, seperti misalnya Provinsi Sulawesi Selatan yang menanggapi pembangunan kereta api. Dalam dokumen RPJPN, pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan hanya menyambungkan Kota Makassar hingga Kota Parepare, sementara di Sulawesi Selatan saat ini tengah membangun kawasan industri Takalar, tapi tidak ada jalur kereta api yang dibangun yang menghubungkan dengan Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antara kawasan industri dengan pasar.

Kolaborasi Pusat-Daerah Serta Stakeholders Pembangunan (Pentahelix)

Sebagian besar wilayah di KTI memiliki kemampuan fiskal yang masih rendah, sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai *stakeholders* termasuk dunia internasional melalui skema-skema kerja sama pembiayaan untuk mendorong penyediaan layanan dasar.

Peran dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas (*Pentahelix*) terutama untuk pengembangan inovasi pengetahuan dalam menghasilkan produk dan jasa yang bernilai tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Model kolaborasi tersebut dapat mengisi ruang-ruang penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan mitra-mitra pembangunan, di antaranya melalui integrasi program pembangunan dalam mengisi gap penyelesaian isu strategis dan kebijakan pengembangan wilayah, menjembatani gap antara harapan nasional terhadap KTI dengan masalah yang dihadapi daerah-daerah di KTI, pelibatan *local champions*, *transfer of knowledge* dari pihak-pihak yang berkolaborasi, serta replikasi *good practices*, yang seluruhnya dapat memberikan daya ungkit yang tinggi terhadap pelaksanaan program pembangunan sehingga Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dapat terwujud.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini dapat menghubungi:
info@bakti.or.id



Seorang Ibu, petani kopi di Merangin, Jambi. Meski kini tingkat kesenjangan mulai menurun, namun penduduk amat rentan jatuh miskin karena ketidakstabilan ekonomi. Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

JALAN MENUJU KEAMANAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh **SATU KAHKONEN, UTZ PAPE & RABIA ALI**

Pemerintah Indonesia telah mencapai cita-citanya untuk beralih dari negara yang berpenghasilan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah. Kemajuan pembangunan yang mengesankan sejauh ini memungkinkan Indonesia untuk secara efektif mewujudkan tujuannya untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.



pengentasan kemiskinan meliputi basis yang luas dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat inklusif, akan tetapi sepertiga dari seluruh jumlah rumah tangga masih rentan jatuh miskin ketika terjadi guncangan. Tingkat kesenjangan juga telah menurun di seluruh Indonesia, meskipun sebagian wilayah pedesaan di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masih tertinggal, khususnya dalam pencapaian modal manusia.

Penurunan kemiskinan Indonesia dari tahun 2002 sampai 2022 dengan menggunakan garis-garis kemiskinan absolut USD1,90 per hari dan US\$3,20 per hari.

Laporan Bank Dunia Indonesia *Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security* mencermati tren kemiskinan dan pemerataan, dan menjabarkan rekomendasi bagaimana Indonesia dapat melanjutkan dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan bagi segmen penduduk yang lebih besar – sesuai dengan cita-citanya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Laporan ini menyoroti perlunya bagi Indonesia untuk memperluas definisi kemiskinan, ketika kemiskinan ekstrem yang diukur berdasarkan Paritas Daya Beli (PPP) pada tahun 2011 sebesar US\$1,90 turun menjadi 1,5 persen pada tahun 2022.

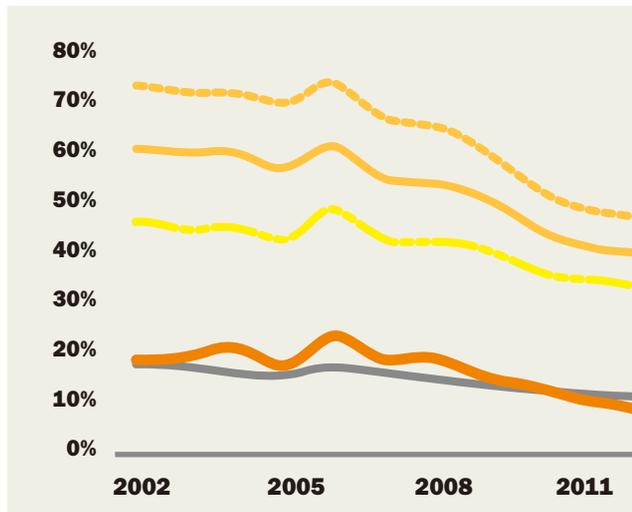
Peralihan PPP menjadi US\$3,20 per hari akan berdampak pada bukan hanya jumlah orang miskin, melainkan juga profil mereka, misalnya dengan termasuknya lebih banyak pekerja dari luar sektor pertanian. Kemiskinan juga akan lebih bersifat sementara. Oleh karena itu, kebijakan perlu diperluas dari hanya menargetkan penduduk yang sangat miskin menjadi strategi pertumbuhan yang inklusif, agar rumah tangga miskin dapat mencapai keamanan ekonomi. Sebuah pendekatan multi-cabang (*multi-pronged approach*) berdasarkan tiga langkah yang saling melengkapi dapat membantu mencapai ambisi baru ini: menciptakan peluang yang lebih baik, melindungi rumah tangga dari kemiskinan, dan mendanai investasi yang berpihak pada rakyat miskin.

Menciptakan Peluang yang Lebih Baik

Cara yang paling berkelanjutan untuk terbebas dari kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan angka pengangguran sebesar 5,9 persen pada tahun 2022, maka sebagian besar penduduk Indonesia sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan. Bahkan dari antara penduduk miskin dan rumah tangga yang belum aman secara ekonomi, lebih dari 8 di antara 10 orang mempunyai pekerjaan. Akan tetapi, penghasilan mereka masih belum cukup untuk terbebas dari kemiskinan-dan belum mampu mencapai keamanan ekonomi.

Di wilayah-wilayah pedesaan, satu dari dua rumah tangga miskin mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Tetapi, penghasilan dari pertanian saja belum cukup untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Di wilayah perkotaan maupun pedesaan, banyak rumah tangga yang juga bekerja di bidang jasa. Meskipun sektor jasa dapat memberikan pekerjaan yang produktif, banyak pekerja terperangkap di sektor jasa yang bernilai tambah rendah dengan penghasilan yang tidak memadai.

Tantangan produktivitas yang rendah dapat ditanggulangi dari berbagai sisi. Produktivitas pertanian dapat ditingkatkan melalui penyuluhan pertanian dan akses pasar yang lebih baik. Penghapusan subsidi pertanian yang difokuskan pada produksi pangan dapat mendorong usaha pertanian tanaman komersial, kerap lebih cocok



Meski rasio jumlah penduduk yang bekerja sudah lebih baik, penghasilan mereka masih belum cukup untuk terbebas dari kemiskinan.

Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**



pertanian dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah, demikian pula dengan dikajinya kembali penerapan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan pajak atas minuman beralkohol, tembakau, gula dan karbon juga dapat menambah dana investasi yang berpihak kepada rakyat miskin.

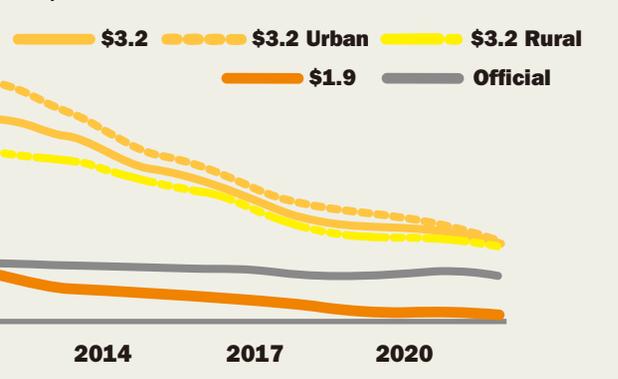
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah khususnya di bidang pengelolaan belanja daerah dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan

kesehatan. Hal ini khususnya penting dalam konteks daerah terpencil dan tertinggal-yang memiliki kapasitas terendah sehingga menunjukkan pencapaian modal manusia yang sangat rendah. Maka, investasi pada peningkatan kapasitas juga dapat membantu mengurangi kesenjangan di Indonesia.

Kesimpulan

Serangkaian kebijakan yang dirancang dengan cermat dan terpadu dalam sebuah pendekatan multi-cabang (*multi-pronged approach*) dapat membantu melanggengkan kisah sukses Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Rangkaian kebijakan tersebut akan membantu rumah tangga di Indonesia mencapai keamanan ekonomi, sehingga guncangan-guncangan yang terjadi tidak dapat mengurangi hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya pengentasan kemiskinan, sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan status sebagai negara berpenghasilan tinggi.

Penurunan kemiskinan Indonesia dari tahun 2002 sampai 2022 dengan menggunakan garis-garis kemiskinan absolut USD1,90 per hari dan US\$3,20 per hari.



INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/jalan-menuju-keamanan-ekonomi-di-indonesia>



Seorang warga menunjukkan instalasi septiknya yang sudah lebih baik dan aman. Hampir 70 persen sumber air minum di Indonesia tercemar bakteri E.coli dari feses atau tinja, memicu penyakit diare dan *stunting* pada anak.
Foto: Dok. Yayasan BaKTI

ATASI *STUNTING*, OPTIMALKAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Oleh **TIM PROGRAM WASH, BaKTI-UNICEF**

Tingkat *Stunting* dan Sanitasi Aman di Indonesia

Stunting, atau kondisi gagal tumbuh kembang bisa disebabkan beberapa faktor; lingkungan, kebersihan dan kecukupan nutrisi di masa balita. Seorang anak dengan kondisi *stunting*, fisiknya cenderung tumbuh lebih pendek, tidak sesuai dengan usianya, dan tertinggal kemampuan kognitifnya. *Stunting* tidak semata-mata akibat dari kurang gizi tapi juga karena air minum dan makanan yang dikonsumsi tercemar bakteri jahat akibat dari kondisi lingkungan dan sanitasi yang buruk atau tidak sehat.

Pada tahun 2022, berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) Kementerian Kesehatan prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 21,6%. Angka tersebut masih berada di atas standar WHO 20%. Secara khusus, di tahun yang sama, prevalensi *stunting* di Sulawesi Selatan mencapai 27,2%. Provinsi ini menduduki peringkat ke-10 prevalensi balita *stunting* tertinggi di Indonesia. Tingginya tingkat *stunting* di Indonesia menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2% sampai 3% dari PDB atau mencapai 300 triliun rupiah per tahun.

Sementara itu berdasarkan data BPS, tingkat sanitasi aman di Indonesia, pada tahun 2022 masih 7 persen atau dengan kata lain masih ada 93 persen sanitasi yang tidak aman. Ini mengindikasikan tingginya tingkat pemakaian jamban kakus di rumah-rumah di Indonesia yang masih belum kedap air atau belum sesuai SNI dan limbah tinjanya tidak disedot secara rutin per tiga tahun sekali.

Karena tingginya tingkat sanitasi buruk tersebut, pada tahun 2022, berdasarkan studi Kementerian Kesehatan Indonesia, hampir 70 persen sumber air minum di Indonesia tercemar bakteri *E.coli* dari feses atau tinja. Tingginya anak-anak yang menderita penyakit diare dan mengalami *stunting* tentu saja sangat berkaitan dengan tingkat pencemaran yang tinggi ini, karena mereka tiap hari mengkonsumsi air yang tercemari air tinja tersebut.

Untuk mewujudkan sanitasi aman di Indonesia, ternyata masih banyak tantangan, salah satunya adalah belum optimalnya layanan air limbah domestik atau penyedotan air lumpur tinja dari tangki septik di rumah-rumah. Penyedotan lumpur tinja dari tangki septik harus dikerjakan secara reguler sekali dalam 3 atau 5 tahun. Selain karena kurang sosialisasi program layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal dan belum optimalnya layanan air limbah domestik juga disebabkan oleh IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang telah dibangun di daerah banyak yang tidak difungsikan secara optimal, seperti yang terjadi di kabupaten Wajo. Padahal keberfungsian IPLT secara optimal menjadi indikator utama terlaksananya pengelolaan

sanitasi aman (*safely managed sanitation*) di suatu daerah.

IPLT merupakan subsistem terakhir tempat mengolah lumpur tinja yang disedot dari tangki septik di rumah tangga lalu dibuang ke lingkungan setelah dipastikan aman. Melalui proses yang dikerjakan secara aman itulah sehingga air lumpur tinja yang mengandung bakteri *E-coli* tidak mencemari air tanah atau air minum. Dengan demikian menangani air lumpur tinja merupakan upaya paling awal mencegah berbagai penyakit termasuk *stunting* anak.

Membenahi IPLT yang Terbengkalai

IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Wajo dibangun oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2016 dan selesai tahun 2017 dengan dana kurang lebih 4 miliar diambil dari APBN. IPLT ini menampung lumpur tinja kurang lebih 27 kubik per hari. Namun sayangnya, semenjak selesai pembangunannya sampai pertengahan tahun 2023, IPLT ini terbengkalai tidak digunakan dengan optimal. Karena lama terbengkalai, akhirnya di mana-mana ditumbuhi ilalang. Pagar untuk melindunginya bahkan hilang dipreteli maling. Kolam-kolamnya kotor, sebagian banyak menampung sampah plastik karena area IPLT bersebelahan langsung dengan tempat pembuangan akhir sampah daerah.

Karena belum difungsikan secara optimal, bisa dipastikan penyedotan air lumpur tinja selama ini juga belum terlaksana secara berkelanjutan. Ataupun kalau dilakukan, air lumpur tinjanya tidak diolah sesuai SOP pengolahan di IPLT.

Di lain pihak, kementerian PUPR telah memberikan paket bantuan tangki septik (kedap berstandar SNI) ke masyarakat Kabupaten Wajo untuk 35 rumah tangga masing-masing di 11 desa pada tahun 2023, 50 rumah tangga di masing-masing 16 desa pada tahun 2022, dan 50 rumah tangga masing-masing untuk 5 desa pada tahun 2021. Pembagian tangki septik ini bertujuan untuk menjadikan seluruh masyarakat mencapai sanitasi layak dan aman.

Konsekuensi dari hibah tangki septik tersebut yakni keharusan bagi pemilik rumah



tangga penerima menjadi pelanggan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) sekali dalam tiga tahun atau layanan L2T3 (Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal). Jika kedua program tersebut ingin terlaksana dengan baik maka secara otomatis IPLT harus difungsikan secara optimal.

Menurut Djoko Sugiharto, Konsultan Ahli IPALD Nasional, Kalau tidak disedot secara rutin minimal tiga tahun sekali, air tinja yang tertampung di tangki septik akan merembes ke sumur-sumur masyarakat yang merupakan sumber pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari mereka. Hal ini akan sangat berbahaya, karena air tinja mengandung bakteri *E-coli* yang bisa menyebabkan penyakit seperti diare, sakit perut, radang selaput otak, *stunting*, dan lain-lain. Dengan demikian, IPLT yang terbengkalai ini sudah harus bisa berfungsi dengan baik tahun 2023 ini, saat tangki septik yang dihibahkan di tahun 2020 lumpur tinjanya sudah waktunya harus disedot.

Menurut bapak Ahmadi, Sekretaris Dinas PUPR daerah Wajo, ada beberapa penyebab terbengkalainya IPLT Wajo ini antara lain: IPLT

dibangun tanpa diikuti dengan penyiapan SDM yang handal di bidangnya oleh pemerintah pusat. Kelembagaan UPT PALD dibentuk tahun 2020 saat diserahkan ke Dinas PUPR, yang sebelumnya satu unit di bawah Dinas Lingkungan Hidup.

Selain masalah IPLT yang harus segera difungsikan kembali, ada beberapa tantangan lain yang dihadapi Pemda Wajo dalam mengatasi masalah sanitasi; saat ini Pemda hanya memiliki satu truk penyedot tinja. Padahal jumlah penduduk Kabupaten Wajo 400 ribu jiwa, dengan jumlah rumah tangga kurang lebih 100 ribu (data BPS). Tantangan lain adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya secara periodik menyedot tinja dari tangki septik mereka masih sangat minim. “Rata-rata UPTD PALD cuma melakukan 16 kali penyedotan per tahun. Untuk mencapai tingkat sanitasi aman, sosialisasi pentingnya melakukan penyedotan secara rutin kepada masyarakat sangat perlu dilakukan segera,” ujar Andi Pameneri, Kepala Dinas PUPR Wajo.

Namun, dari sisi regulasi pengoperasian UPT PALD sudah lebih siap karena Kabupaten Wajo telah menerbitkan tiga regulasi daerah yang bisa menjamin keberlanjutan pengelolaan air



(Kiri) Petugas penyedotan tinja di UPT PALD Wajo. Penyedotan lumpur tinja harus terjadwal minimal tiga tahun sekali, jika tidak air tinja di tangki septik akan merembes ke sumur-sumur masyarakat dan mencemari airnya. (Atas)Tangki septik kedap berstandar SNI yang jauh lebih aman bagi masyarakat.

Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

limbah domestik: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan (3) Peraturan Bupati No. 98 tentang 2021 tentang SOTK Pengelola Air Limbah Domestik Dinas PUPR.

Intervensi Pendampingan Penguatan Kelembagaan dan SDM

Rangkaian kegiatan pendampingan melalui kerja sama Pokja AMPL/PPAS provinsi, UNICEF, dan Yayasan BaKTI yang akan dilaksanakan ke depan diharapkan dapat berkontribusi terhadap performa manajemen UPT PALD, penyediaan data pelanggan, dan khususnya pengoperasian penyedotan lumpur tinja, pengangkutan, dan pengolahan di IPLT sesuai dengan SOP masing-masing.

Kegiatan yang awal yang dilaksanakan adalah *Workshop* Pendampingan Penyelenggaraan Sanitasi Aman: Pengelolaan Air Limbah Domestik di Hotel Sallo, Kabupaten Wajo, 20-22 Juli. 2023. Kegiatan berlangsung tiga hari. Pemaparan dan elaborasi materi di kelas selama dua hari, dan sehari di luar kelas pada hari ketiga dengan kegiatan pengamatan dan praktik penyedotan tangki septik di rumah tangga yang dilanjutkan dengan kegiatan pengamatan di area pengolahan lumpur tinja di IPLT. Peserta yang ikut sebanyak 25 orang; 2 orang dari Bappelitbangda, 8 orang dari Dinas PUPR, dan 15 orang dari UPTD PAL. Mereka didampingi oleh tiga narasumber pelatih: Joko Sugiharto Konsultan Ahli Nasional IPALD, Muhammad Arif Konsultan PALD Makassar, dan Niswaryadi Sadiq, Kementerian PUPR-BPPW Sulawesi Selatan.

Luaran dari kegiatan pendampingan awal mencakup: *review* regulasi PALD, hasil revisi SOP admin layanan air limbah domestik, dan SOP teknis, kesepahaman fungsi dan peran regulator dan operator, penyiapan *database* pelanggan dan calon pelanggan penyedotan lumpur tinja program L2T3 dan L2T2, rekomendasi perbaikan teknis sejumlah komponen di IPLT dan perangkat yang dibutuhkan.

Kepala Dinas PUPR Andi Pameneri menyambut baik pelatihan ini. “Pelatihan dan pendampingan ini sangat berguna bagi operator dan regulator IPTL untuk menambah pengetahuan dan menguatkan peran dan fungsi mereka masing-masing. Kami berharap akan ada pendampingan lebih jauh,” ujarnya.

Sejumlah agenda ke depan yang penting ditindaklanjuti oleh segenap *stakeholder* ALD Wajo khususnya, Dinas PUPR dan Bappelitbangda antara lain upaya perbaikan aspek pelayanan, aspek teknis dan operasional, penyediaan anggaran operasional, dan penguatan dan kecukupan SDM dengan kualifikasi yang handal di bidangnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Kerja Sama UNICEF-Yayasan BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id



VOICES FOR JUST CLIMATE ACTION DI FESTIVAL FORUM KTI 2023

Oleh **RIDWAN ARIF**

Program *Voices for Just Climate Action* (VCA) Indonesia telah berjalan sejak tahun 2021, secara global program VCA dilaksanakan di enam negara lainnya yaitu Brazil, Bolivia, Paraguay, Kenya, Tunisia, dan Zambia. Di Indonesia sendiri, program ini dipayungi oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial Indonesia yang merupakan afiliasi dari Hivos Foundation. Adapun tujuan utama dari program VCA adalah

“pada 2025, kelompok masyarakat sipil di tingkat lokal-ke-nasional termasuk pelaku iklim (perempuan dan laki-laki) telah diakui dan didukung sebagai inovator, fasilitator dan penasihat termasuk, menjadi mitra pemerintah untuk membawa transisi berkeadilan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan”. Melalui pendekatan adaptasi berbasis masyarakat lokal, sehingga dapat terjadi sinkronisasi kebijakan dengan konteks yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Yayasan Koaksi Indonesia tergabung dalam program VCA Indonesia bersama tujuh belas organisasi lainnya yang terbagi menjadi empat Koalisi yaitu **1** Koalisi Sipil yang terdiri dari Yayasan Koaksi Indonesia dan Yayasan Pikul; **2** Koalisi Kopi yang terdiri dari Hutan Itu Indonesia dan Teras Mitra; **3** Koalisi Pangan Baik yang terdiri dari Yayasan KEHATI, Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan (KRKP), Yayasan Ayu Tani Mandiri, Ayo Indonesia, dan Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL); **4** Koalisi Adaptasi yang terdiri dari Yayasan Penabulu, Yayasan Koordinasi Pengkajian & Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yayasan Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata, Perkumpulan Yapeka, Perkumpulan Sinergantara, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Perkumpulan Konsil LSM Indonesia, Perkumpulan Desa Lestari, dan Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin – Institut



Kegiatan *side event* yang menghadirkan empat narasumber dari mitra Program VCA Indonesia dan para pengunjung di pameran VCA Indonesia di ajang Forum KTI IX di Kupang.

Foto: **Dok. Yayasan BaKTI**

Pertanian Bogor. Seluruh organisasi tersebut memiliki berbagai program di tingkat nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tanggal 26-27 Juli 2023 Hivos Indonesia bersama Koalisi untuk Program VCA di NTT membuka *booth* pameran di Festival Forum KTI (FFKTI) IX 2023 di Hotel Harper Kota Kupang. Tujuan dari partisipasi ini adalah untuk memperkenalkan program VCA Indonesia, menjalin potensi kolaborasi dengan lembaga lain, dan juga peningkatan pengetahuan terkait perubahan iklim melalui permainan interaktif. Pengunjung yang datang ke booth VCA Indonesia disuguhkan dengan berbagai informasi terkait program dan fokus kerja dari masing-masing Koalisi baik secara interaksi langsung maupun selebaran yang dicetak. Beberapa pengunjung juga tertarik melakukan kolaborasi dengan program VCA Indonesia di NTT, ketertarikan datang dari pemerintah provinsi, lembaga non profit, maupun individu. Media massa juga kerap kali mendatangi *booth* pameran untuk menggali lebih dalam dalam program VCA Indonesia.

Disamping mendapatkan informasi mengenai Program VCA Indonesia, pengunjung juga dapat bermain melalui permainan yang dipandu oleh teman-teman komunitas anak muda di NTT. Adapun permainan yang ditawarkan adalah cerdas cermat, mencocokkan gambar, dan menyusun puzzle. Semua permainan ini mengangkat topik perubahan iklim, sehingga pengunjung lebih tertarik berdiskusi setelah mereka menyelesaikan permainan. Dalam 2 (dua) hari FFKTI IX ada 100 (seratus) lebih pengunjung mendatangi pameran *booth* Program VCA Indonesia.

Tentang Festival Forum KTI IX

Diambil dari narasi pada undangan kegiatan FFKTI IX. Festival Forum KTI adalah sebuah perayaan keberhasilan dan inovasi pembangunan di Indonesia. Tujuan Festival Forum KTI adalah berbagi praktik cerdas, pengalaman, dan pembelajaran dari berbagai program pembangunan dari tingkat lokal untuk meningkatkan rasa kepemilikan, mengharmonisasi, serta memperbaiki pengelolaan program ke arah keberhasilan pembangunan nasional.

Pada pelaksanaan Festival Forum KTI IX tahun ini, Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kota Kupang. Festival Forum Kawasan Timur Indonesia

hadir untuk merayakan kemajuan dan inovasi pembangunan di Indonesia. Festival ini memungkinkan peserta berbagi informasi tentang praktik cerdas, pengalaman dan pembelajaran dari berbagai program pembangunan di tingkat lokal untuk memperkuat harmonisasi pembangunan serta meningkatkan manajemen program dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Selain pameran atau yang disebut dengan Galeri Informasi, Yayasan BaKTI juga menyuguhkan kegiatan lain pada Festival Forum KTI tahun ini yaitu panggung inspirasi, *side event*, *local champion incubator*, dan malam budaya. Meskipun diselenggarakan di Kota Kupang, namun peserta yang datang adalah dari berbagai penjuru provinsi di Indonesia. Acara ini dapat menyatukan individu dengan latar belakang yang beragam, ada yang datang dari sektor pemerintahan, media massa, akademisi, CSO, swasta, dan publik. Festival seperti ini sebaiknya terus dipertahankan agar interaksi lintas lembaga dapat terus terjalin.

Side Event

Partisipasi Program VCA Indonesia pada FFKTI IX tidak hanya melalui pameran booth, tetapi juga pada kegiatan *side event*. Pada *side event*, topik yang diangkat adalah "Adaptasi Efektif dan Solusi Berbasis Kearifan Lokal yang Berkeadilan". *Side event* dirancang dengan konsep interaktif agar tercipta diskusi dua arah antara narasumber dengan peserta yang hadir.

Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2023 ini diawali dengan nonton bareng (nobar) Film *Climate Witness*. Kemudian dilanjutkan sesi talkshow dengan 4 (empat) narasumber yang merupakan tokoh masyarakat dari NNT. Adapun narasumber tersebut adalah **1** Joni Messakh – Pewaris Mangrove Desa Tanah Merah, Kabupaten Kupang, NTT; **2** Lunggi Randa – Pemuka Adat Kampung Wundut, Kabupaten Sumba Timur, NTT; **3** Maria Mone Soge – Aktivistis Pangan Lokal Desa Hewa, Kabupaten Flores Timur, NTT; **4** Lia Wanda – Perwakilan @murarame.hub. Setelahnya, para peserta akan dibagi menjadi 4(empat) kelompok dengan tema **1** Masyarakat adat; **2** Konservasi lingkungan; **3** Pangan lokal; **4** Mobilisasi anak muda. Keseluruhan kegiatan *side event* dimoderatori oleh Yurgen Nubatonis.

Berbagai cerita yang datang dari narasumber adalah pengalaman pribadi yang telah mereka rasakan. Keresahan akan dampak perubahan iklim

menjadikan mereka sadar perlu adanya aksi dalam menyelamatkan lingkungan sekitarnya. Maria Mone Soge yang merupakan guru SMA di tempatnya tinggal, pada akhirnya juga harus melakukan aksi dalam penyelamatan eksistensi pangan lokal. Karena pangan lokal mulai tersingkirkan keberadaannya dengan pangan dari industri, padahal pangan lokal memiliki lebih banyak manfaat dan lebih tahan pada kondisi lingkungan sekitar. "Kami makan apa yang kami tanam, dan kami tanam apa yang kami makan" ucap Maria Mone Soge saat bercerita.

Upaya konservasi lingkungan juga dilakukan oleh tiga narasumber lainnya, namun dengan pendekatan yang berbeda. Namun, hal yang menjadi dorongan mereka datang dari keresahan jika alam atau alam sekitar tempat mereka tinggal rusak, maka tidak ada lagi kehidupan bagi mereka. Aksi pertobatan ekologis dilakukan oleh komunitas yang tergabung dalam @murarame.hub sebagai kesadaran mereka untuk hidup seimbang dengan alam, apa yang mereka dapatkan dari alam harus dikembalikan lagi ke alam. Salah satunya dengan menghitung jejak emisi karbon dari semua aktivitas masa lampau yang kemudian dikonversi menjadi jumlah pohon yang harus mereka tanam.

Lain cerita dengan Bapak Lunggi Randa yang melakukan konservasi hutan melalui adat istiadat budaya setempat. Hutan di kampungnya dilindungi dengan adat, sehingga tidak diizinkan menembang pohon atau mengambil hasil hutan tanpa ritual adat. Sedangkan Om Joni Messakh melakukan penanam dan perawatan mangrove di pesisir Desa Tanah Merah sudah hampir 20 tahun, akibat tidak adanya pelindung antara laut dengan pemukiman warga di desa tersebut. Om Joni khawatir jika tidak pelindung maka suatu saat daratan akan tergerus oleh gelombang air laut.

Side event yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut berhasil mendatangkan lebih dari 60 peserta. Di mana peserta terlibat aktif dalam diskusi kelompok kecil dan saling bertukar cerita. Kegiatan *Side event* VCA juga mendapatkan *feedback* positif dari peserta, karena rangkaian acara yang saling berkesinambungan dan diskusi pada kelompok kecil membuat peserta lebih leluasa berbagi cerita dengan para narasumber.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Research and Knowledge Management Manager Coaction Indonesia dan dapat dihubungi melalui email: ridwan.arif@coaction.id



Diskusi Inspirasi BaKTI Virtual

Diskusi JiKTI: Mengintegrasikan Hasil Penelitian Ke dalam Kebijakan Daerah



Salah satu cara percepatan pembangunan daerah adalah dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk itu, keberadaan produk unggulan daerah harus didukung oleh kebijakan daerah yang berbasis bukti melalui hasil penelitian.

Bagaimana mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kebijakan untuk mendorong kebijakan daerah yang efektif dan tepat sasaran? Ikuti Diskusi Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI) Wilayah Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Lombok Research Center (LRC) "Mengintegrasikan Hasil Penelitian Ke dalam Kebijakan Daerah: Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah Lombok Timur".

Selengkapnya kunjungi <https://www.youtube.com/@YayasanBaKTI/>

Podcast BASUARA

Pemuda Adat Pulang Kampung



Michelin Sallata, anak muda asal Toraja ini terpilih sebagai Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Perempuan asal Komunitas Masyarakat Adat Mengkendek Toraya, Sulawesi Selatan itu berhasil mengukir sejarah dengan menjadi perempuan pertama yang memimpin organisasi pemuda adat sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Salah satu program utama dan pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan Gerakan Pulang Kampung. Pemuda harus pulang ke kampung, kembali membangun bersama masyarakat adat yang keberadaan dan hak-haknya banyak yang tergerus karena desakan pembangunan yang tak berpihak pada mereka.

Memanfaatkan Limbah untuk Biogas



Potensi pengembangan biogas di Indonesia masih cukup besar mengingat cukup banyaknya populasi ternak serta limbah organik lain. Untuk setiap satu ekor sapi/ kerbau dapat menghasilkan kurang lebih dua m3 biogas per hari dan ini cukup untuk keperluan memasak dan penerangan dalam skala rumah tangga. Penggunaan biogas ini memiliki banyak keuntungan, antara lain: mengoptimalkan limbah organik yang sudah tidak terpakai sehingga tidak menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan.

Selain itu juga menghasilkan hasil samping tambahan berupa kompos organik baik dengan bentuk kompos cair maupun kompos padat dengan kualitas yang sangat tinggi dan cocok sebagai pupuk organik untuk segala jenis tanaman. Podcast Basuara menghadirkan Ibu Agustina - Mitra Pembangun Biogas.

Podcast BASUARA (BaKTI Pu Suara) adalah tempat berbagai cerita yang memberi inspirasi, memperkaya pengetahuan dari beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendorong meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.

Artikel

Pentingnya Dukungan Semua Pihak: Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk Mendorong Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Perekonomian

Jika pendapatan dari usaha milik perempuan meningkat menjadi sebanding dengan usaha milik laki-laki, maka perekonomian Indonesia dapat menghasilkan lebih dari US\$428 juta per tahun. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat menjadi 58 persen, yang merupakan komitmen Indonesia saat G20, pertumbuhan PDB dapat meningkat sebesar 0,7 persen dan menambah sebesar US\$62 miliar untuk perekonomian.

Indonesia menghadapi kesenjangan gender dalam perekonomiannya. Tantangan dan hambatan gender yang terus-menerus menghambat negara untuk merealisasikan “skenario jika” menjadi kenyataan. Karena adanya kesenjangan seperti pekerjaan perawatan yang tidak dibayar, segregasi gender dalam pekerjaan, diskriminasi di sektor yang didominasi laki-laki, dan akses keuangan dan modal yang terbatas, perempuan berjuang untuk meningkatkan keterlibatan mereka di sektor swasta, baik sebagai karyawan maupun pengusaha. Pandemi COVID-19 memperburuk kesenjangan ini dimana 1,3 juta perempuan meninggalkan pasar kerja karena kehilangan pekerjaan dan usaha yang ditutup.

- <https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/pentingnya-dukungan-semua-pihak-kemitraan-pemerintah-swasta-untuk-mendorong>

Publikasi Terbaru



Mewujudkan Kedaulatan Pangan Masyarakat Pesisir Indonesia

Kebijakan politik agraria dan (kedaulatan) pangan dalam beberapa dekade terakhir mendapat tantangan internal terutama dari dua dilema kembar yaitu: kebijakan politik pangan nasional yang tidak berhitung pada capital lain (*the other capital*) berupa masyarakat produsen utama pangan dan tradisinya—dalam hal tersebut kebijakan pangan nasional sering hanya berorientasi pada struktur modal dan profit.

- <https://www.batukarinfo.com/referensi/mewujudkan-kedaulatan-pangan-masyarakat-pesisir-indonesia>

Berita Terbaru

Selamatkan Cagar Alam Cycloop, Penanaman 78.000 Pohon Bambu Dimulai

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Papua mencanangkan penanaman 78.000 bibit pohon bambu di area kawasan penyangga Cagar Alam Cycloop di Jayapura. Kegiatan yang bertujuan menyelamatkan hutan di kawasan tersebut resmi dimulai pada Jumat (4/8/2023).

Penanaman perdana pohon bambu terlaksana di daerah Pasir Enam, Kota Jayapura. Kegiatan melibatkan para pegawai negeri sipil, pelajar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, pelajar dan masyarakat setempat.

Pelaksana Harian Gubernur Papua Ridwan Rumasukun yang ditemui sesuai kegiatan penanaman mengatakan, kegiatan penyelamatan Cagar Alam Cycloop dengan penanaman bambu merupakan agenda penting Pemerintah Provinsi Papua. Kegiatan ini akan terlaksana secara kontinu dengan melibatkan berbagai pihak dan elemen masyarakat.

- <https://www.batukarinfo.com/news/selamatkan-cagar-alam-cycloop-penanaman-78000-pohon-bambu-dimulai>